

**IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS  
BUDAYA SEKOLAH DI SMP NEGERI 21 KOTA MALANG  
JAWA TIMUR**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**



**Disusun oleh :**

**RAHMA TRI WULANDARI  
NIM : 201720240211020**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2019**

**IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER  
BERBASIS BUDAYA SEKOLAH DI SMP NEGERI 21  
KOTA MALANG JAWA TIMUR**

Diajukan oleh :

**RAHMA TRI WULANDARI**  
**201720240211020**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, Sabtu/ 19 Oktober 2019

Pembimbing Utama

Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Pembimbing Pendamping

Dr. Agus Tinus, M.Pd

Direktur  
Program Pascasarjana



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi  
Magister Kebijakan dan  
Pengembangan Pendidikan

A blue ink signature of Dr. Agus Tinus, M.Pd.

Dr. Agus Tinus, M.Pd

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**RAHMA TRI WULANDARI**

201720240211020

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Sabtu/ **19 Oktober 2019**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua** : **Dr. Budiono, M.Si**  
**Sekretaris** : **Dr. Siti Fatimah Soenaryo, M.Pd**  
**Penguji I** : **Prof. Akhsanul In'am, Ph.D**  
**Penguji II** : **Dr. Agus Tinus, M.Pd**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **RAHMA TRI WULANDARI**  
NIM : **201720240211020**  
Program Studi : **Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **IMPLEMENTASI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS BUDAYA SEKOLAH DI SMP NEGERI 21 KOTA MALANG JAWA TIMUR** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Oktober 2019

Yang menyatakan,



**RAHMA TRI WULANDARI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayahNya, sehingga tesis yang berjudul “Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah Di SMP Negeri 21 Kota Malang Jawa Timur” dapat terselesaikan.

Selama penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa semua tidak akan selesai dengan baik tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Akhsanul In'am, Ph.D., sebagai Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang dan sekaligus sebagai pembimbing utama, yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing dengan sabar dan memberikan saran dalam menyelesaikan tesis.
2. Dr. Agus Tinus, M.Pd., sebagai Kaprodi dan sekaligus pembimbing pendamping yang selalu dengan sabar membimbing kami, menyediakan waktu dan memberikan saran dalam menyempurnakan tesis.
3. Segenap staf pengajar Program Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan yang telah banyak memberikan saran dalam penyempurnaan tesis.
4. Teman-teman MKPP angkatan 2017 tanpa terkecuali yang telah bersama-sama saling menyemangati sehingga penulis telah temukan arti kebersamaan dan persaudaraan.

Malang, 19 Oktober 2019



## ABSTRAK

Wulandari, Rahma Tri. 2019. *Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah Di SMP Negeri 21 Kota Malang Jawa Timur*. Tesis. Program Studi Magister Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing: 1) Prof. Akhsanul In'am, Ph.D., 2) Dr. Agus Tinus, M.Pd. E-mail: rahma\_wulans@yahoo.co.id.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis budaya sekolah di SMPN 21 Kota Malang, serta 2) peran sekolah dalam mendukung implementasi PPK berbasis budaya sekolah di SMPN 21 Kota Malang. Pendekatan yang dilakukan terhadap masalah penelitian adalah pendekatan kualitatif didukung oleh data deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi partisipasi aktif, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan selama penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tahapan persiapan implementasi PPK dilakukan berdasar modul konsep dan pedoman PPK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimulai dengan: menentukan nilai-nilai PPK, menyusun jadwal PPK, mendesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), melakukan evaluasi peraturan sekolah, serta proses sosialisasi. Kegiatan implementasi PPK dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan, dan pengkondisian. 2) peran sekolah dalam mendukung implementasi PPK dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung program; kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta program unggulan yang bermuatan PPK; upaya evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program; serta melibatkan peran wali murid dalam penanaman karakter terhadap siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah di SMPN 21 Kota Malang telah dilaksanakan dengan baik, dan sekolah memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan nilai-nilai karakter yang ada.

**Kata kunci:** *penguatan pendidikan karakter, berbasis budaya sekolah, nilai karakter*

## ABSTRACT

Wulandari, Rahma Tri. 2019. *The Implementation of The Strengthening Character Education Based on School Culture at SMP Negeri 21 Kota Malang Jawa Timur*. Thesis. Education Policy Master Studies Program, Postgraduate Program of University of Muhammadiyah Malang. Supervisor : 1) Prof. Akhsanul In'am, Ph.D., 2) Dr. Agus Tinus, M.Pd. E-mail: rahma\_wulans@yahoo.co.id.

This research study aims to determine: 1) the implementation of Strengthening Character Education (SCE) based on the school culture at SMPN 21 Kota Malang, and 2) the role of school in supporting the implementation of SCE based on school culture at SMPN 21 Kota Malang. The method used in this study is qualitative analysis supported by descriptive data. Sources of data obtained from interviews, observation and document analysis. Data collection techniques used passive participation observation, interviews, and document studies. Data analysis techniques during this study used Miles and Huberman's interactive analysis models, namely data reduction, data display and conclusion drawing. From the result of the research, researcher concludes that: 1) the preparation stages for SCE implementation are based on the module and guideline issued by the Ministry of Education and Culture, starts with: determining SCE values, compiling SCE schedules, designing Education Unit Level Curricula (EULC), evaluating school regulations, and the socialization process. The implementation of PPK has to do through routine, spontaneous, exemplary, and conditioning activities. 2) the school accomplish its role through provide facilities and infrastructure that supports programs; co-curricular and extracurricular, also flagship activities containing SCE values; evaluation efforts to find out the success of the program; and involves the role of student guardians in instilling the character of students. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of SCE based on school culture at SMPN 21 Malang has been well implemented, and schools have enormous potential to develop the existing character values.

**Keywords:** *strengthening character education, based on school culture, character values*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
1. Pendahuluan .....	1
2. Kajian Pustaka .....	7
2.1 Konsep Penguatan Pendidikan Karakter.....	7
2.2 Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter.....	9
2.3 Pengembangan Prinsip dan Nilai-nilai Karakter .....	10
2.4 Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah .....	14
2.5 Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah.....	16
3. Metode Penelitian .....	18
3.1 Pendekatan dan Rancangan Penelitian .....	18
3.2 Lokasi dan Latar Penelitian.....	18
3.3 Kehadiran Peneliti di Lapangan .....	18
3.4 Data dan Sumber Data .....	19
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	19
3.6 Teknik Analisis Data .....	19
3.7 Pengecekan Keabsahan Data.....	20
3.8 Tahap Penelitian .....	20
4. Hasil Penelitian.....	21
4.1 Implementasi PPK Berbasis Budaya Sekolah.....	21
4.2 Peran Sekolah Dalam Mendukung Implementasi PPK .....	29
5. Pembahasan .....	38
5.1 Implementasi PPK Berbasis Budaya Sekolah.....	38
5.2 Peran Sekolah Dalam Mendukung Implementasi PPK .....	39



6. Simpulan Dan Saran .....	41
6.1 Simpulan .....	41
6.2 Saran .....	42
<b>RUJUKAN.....</b>	<b>44</b>



## 1. Pendahuluan

Globalisasi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari oleh seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Arus globalisasi menyebabkan dunia seolah-olah menjadi *satu atap*, sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran pandangan, ideologi, produk, aspek kebudayaan, nilai-nilai sosial dalam tatanan masyarakat, serta semakin kuatnya interdependensi antarkelompok masyarakat. Perkembangan zaman yang semakin global ini ditandai dengan adanya revolusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Saat ini kita bisa merasakan begitu mudahnya mendapat berbagi informasi dari segala penjuru dunia hanya melalui teknologi *smartphone*. Inovasi iptek pada berbagai sosial media juga semakin membuat sekat antarnegara semakin terbuka melalui mudahnya komunikasi di dunia maya.

Kondisi inilah yang semakin memicu masyarakat menuju *open society*, yang dapat menimbulkan fenomena sosial, dimana kebudayaan yang kurang sesuai dengan suatu negara terkadang tidak bisa tersaring dengan baik, sehingga terjadi manipulasi informasi yang mengkhawatirkan (Raharjo, 2010). Salah satu dampak yang saat ini secara langsung dapat diamati adalah adanya dekadensi moral yang ditandai oleh semakin mudarnya nilai-nilai kebersamaan antarelemen masyarakat (Taufik, 2014).

Gejala sosial yang semakin menyimpang ini ditandai dengan berbagai perilaku kurang terpuji, misalkan saja perilaku senang menghujat, menurunkan tingkat toleransi, premanisme, melakukan bisnis tanpa moralitas, praktik korupsi, politik uang, berbagai tindak kriminal dan kekerasan, terorisme, kebencian yang semakin kuat pada etnis tertentu, penyalahgunaan obat terlarang, serta berkurangnya rasa malu terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan (Meirawan, 2010; Raharjo, 2010; Dalmeri, 2014). Sebenarnya berbagai penyimpangan perilaku tersebut tidak hanya menjadi masalah bagi bangsa Indonesia, akan tetapi juga bangsa-bangsa lain di dunia. Menurut Dalmeri (2014), negara maju seperti Amerika, Jepang, dan Eropa juga mengalami persoalan yang sama, terkait dengan permasalahan menurunnya karakter masyarakat walaupun ragam dan intensitasnya berbeda. Salah satu contoh perilaku negatif yang menjadi momok bagi seluruh bangsa di dunia adalah maraknya

berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara.

Hampir seluruh negara sepakat bahwa perlu adanya tindakan untuk mengantisipasi perilaku yang terkait dengan menurunnya kualitas karakter manusia, salah satunya adalah melalui pendidikan karakter. Menurut Taufik (2014), kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas karakter masyarakatnya. Sedangkan kualitas masyarakat ditentukan oleh kualitas karakternya. Bangsa yang memiliki kualitas karakter yang baik, diyakini akan membawa perubahan di seluruh aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dalmeri (2014), yang menyatakan bahwa karakter yang berkualitas akan berimbas pada kualitas generasi suatu bangsa, sehingga kualitas karakter yang baik bukan lagi menjadi kepentingan individu, akan tetapi untuk warga masyarakat secara keseluruhan dan bagi sebuah bangsa. Menurut Wahyu (2011), karakter yang kuat ditunjukkan melalui sikap tertib aturan, mandiri, menghormati orang lain, perhatian dan kasih sayang, bertanggung jawab, adil, berperan sebagai warga negara yang baik, dan mendahulukan kepentingan khalayak. Berdasarkan beberapa pandangan di atas, Agboola dan Tsai (2012) memiliki pandangan bahwa pendidikan karakter tidak boleh dianggap enteng, karena memiliki efek mendasar bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

Walaupun masyarakat di negara-negara maju masih memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap tata tertib dan pelaksanaan peraturan yang berlaku, tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai perilaku demoralisasi yang mengkhawatirkan. Apakah upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan terkait krisis moral yang terjadi?. Menurut Towaf (2014), jawaban paling tepat dari pertanyaan ini adalah pemberdayaan karakter bangsa. Upaya ini bisa dilakukan baik secara informal maupun formal. Secara informal, proses ini dilakukan melalui pembudayaan atau inkulturasi melalui sosialisasi ataupun pembiasaan, sedangkan jalur formal bisa dilakukan melalui pendidikan yang berperan dalam pelestarian nilai-nilai dan pembentukan karakter bangsa. Karakter bangsa yang kuat dihasilkan dari pendidikan karakter yang bagus. Bila sebagian besar masyarakat memiliki karakter yang kuat, maka peradaban suatu bangsa akan semakin tinggi. Sebaliknya bila sebagian besar masyarakat memiliki karakter negatif, peradaban yang dibangun akan lemah sebab memiliki pondasi yang lemah pula (Raharjo, 2010).

Salah satu lembaga polling di Amerika, Gallup, telah melakukan survei terhadap 40% masyarakat Amerika, dimana 77% percaya bahwa nilai moral di tengah masyarakat semakin menurun, terutama terkait dengan semakin meningkatnya tindakan kriminal dan penyalahgunaan obat terlarang (Suyanto, 2011). Lickona (2013) telah merangkum dari berbagai majalah dan hasil survei yang menyatakan bahwa penurunan moral sangat luas baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan remaja. Mengemudi dalam keadaan mabuk, melakukan penipuan, curang dalam mengisi formulir pajak, kekerasan dan vandalisme, pelecehan seksual, serta meningkatnya sifat egoisme, serta menurunnya tingkat tanggung jawab sebagai warga negara, merupakan gejala degradasi moral yang semakin nampak.

Pada dasarnya Amerika telah menyadari terjadinya kemerosotan moral sejak tiga dekade lalu. Bahkan pada tahun 1992, dilakukan pertemuan khusus membahas tentang degradasi moral yang semakin mengkhawatirkan, dan munculah deklarasi Aspen, yang merupakan kesepakatan untuk membangkitkan kesadaran warganya melalui program pendidikan karakter di sekolah (Sultoni, 2016). Lebih lanjut menurut Suyanto (2011), terdapat sekitar 40 program pengembangan pendidikan karakter di Amerika, diantaranya adalah program *Character Development & Leadership* (CD & L), dan *Character Education Partnership* (CEP), yang telah diberikan melalui pelatihan kepada ribuan guru dan peserta didik.

Di benua Eropa, kita bisa memantau dari berbagai pemberitaan bahwa tingkat karakter penduduknya juga mengalami kemerosotan, salah satunya dengan dilegalkannya hubungan sesama jenis di beberapa negara. Berbagai perilaku pelecehan dan penyimpangan seksual pun marak menjadi pemberitaan, bahkan dilakukan oleh pejabat negara. Akan tetapi, kemerosotan karakter yang terjadi di Eropa, merupakan sesuatu yang relatif dan tidak berarti karakter positif masyarakatnya hilang sama sekali. Dapat kita lihat bahwa kesadaran masyarakatnya dan rasa menghormati hak orang lain pun masih sangat tinggi. Misalkan saja bagaimana hak pejalan kaki sangat dihormati, budaya antri, disiplin, dan rasa toleransi dengan masuknya imigran dari negara lain yang diperlakukan dengan baik.

Salah satu negara di Eropa, yaitu Inggris, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Arthur (2016), mulai melakukan perbandingan tentang pendidikan karakter di

negara-negara di wilayah Asia (Cina, Vietnam, Taiwan, Singapura, Korea Selatan dan Jepang). Hal ini dikarenakan Inggris memiliki penilaian bahwa pendidikan karakter di negara-negara tersebut mengalami perkembangan yang luar biasa. Selanjutnya Arthur menyampaikan bahwa secara implisit, terdapat hubungan antara pendidikan karakter dengan hasil belajar, yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya penilaian peserta didik secara internasional melalui PISA (*Programme for International Students Assessment*) di negara-negara tersebut.

Untuk wilayah Asia, kita tidak bisa menafikan posisi negara Cina dalam pendidikan karakter. Jalaludin (2012) menyatakan bahwa hampir seluruh pemimpin di Cina, dari Jiang Zemin sampai Hu Jianto sangat memperhatikan pentingnya pendidikan karakter dan terus meningkatkan sistem pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif. Walaupun di beberapa pemberitaan masih bisa kita saksikan adanya kasus korupsi dan berbagai tindak penipuan terutama dalam bisnis yang terjadi di Cina, akan tetapi kita bisa melihat betapa kuatnya rasa nasionalisme masyarakat Cina dengan sikap sangat mencintai produk dalam negeri, dan betapa masyarakat Cina terkenal memiliki etos kerja dan disiplin yang sangat tinggi.

Pada ruang lingkup negara di regional Asia Tenggara, kita bisa berkaca pada Singapura dan Malaysia. Bukan suatu rahasia lagi bahwa Singapura merupakan satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara, yang memiliki peradaban setara dengan negara-negara Eropa. Kita bisa menyaksikan masyarakat di Singapura begitu taat peraturan dan memiliki kesadaran yang sangat tinggi sebagai warga negara. Suatu hal yang sangat menarik bila kita menyimak suatu fenomena, dimana masyarakat Indonesia yang di negaranya sendiri tidak taat peraturan, ketika mereka berkunjung di Singapura, mereka akan merubah perilaku menjadi taat peraturan, misalkan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Pemerintah Singapura menetapkan nilai nasional yang disebut dengan *The Shared Values*, yang memuat nilai-nilai konfusianisme yang dijadikan sebagai identitas sekaligus ideologi nasional, dengan mempertimbangan aspek multikulturalisme yang ada (Hartati, 2018). Lebih lanjut menurut Istiningsih (2016), pola pendidikan di Singapura telah memiliki komitmen yang sangat kuat di semua tingkatan sistem. Peran orang tua, guru, pembuat kebijakan, bahkan sampai pada



peserta didik sangat positif tentang pentingnya nilai pendidikan karakter. Sedangkan sekolah memiliki istilah Model Segitiga dalam pengembangan karakter, yaitu mengedepankan hubungan keterampilan, pengetahuan sekaligus karakter dalam sistem pendidikan.

Malaysia, memiliki pendidikan karakter yang tidak mudah, dikarenakan memiliki tiga bangsa berbeda yang hidup dalam satu negara (Melayu, Cina dan India). Untuk mengantisipasi adanya benturan sosial, maka pada tahun 1970 diciptakanlah program Rukun Negara yang berkomitmen walaupun terdapat berbagai perbedaan, tetapi mereka menjunjung tinggi persatuan negara Malaysia (Balakrishnaa, 2010). Pada perkembangannya, program terkait dengan pendidikan karakter di Malaysia dikenal dengan istilah *Moral Education* (ME), yang telah dikembangkan dalam silabus khusus agar dapat menjadi payung kuat di lingkungan masyarakat yang multikultural. Dengan adanya tiga bangsa yang hidup berdampingan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rasa toleransi sangat kuat di masing-masing individu masyarakat, dikarenakan sampai saat ini masih belum kita dengar dari pemberitaan adanya konflik yang diakibatkan oleh pertikaian antar bangsa. Hal ini patut ditiru oleh bangsa Indonesia, dikarenakan realita pada saat ini bangsa Indonesia sangat mudah tersulut isu agama dan perbedaan ras.

Bagaimanakah dengan bangsa Indonesia?. Membahas tentang pendidikan karakter di Indonesia, sebenarnya Ir. Soekarno selaku presiden Republik Indonesia yang pertama, telah menegaskan pentingnya *nation* dan *character building* sejak awal kemerdekaan (Wahyu, 2011). Pada perkembangannya sekitar tahun 1960, terdapat mata pelajaran Pendidikan Budi Pekerti yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Selanjutnya pada masa orde baru, terdapat program Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), dan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang memuat secara implisit moral khas bangsa Indonesia. Sedangkan pada pascareformasi, pendidikan karakter berfokus pada penekanan iman dan takwa serta akhlak mulia (Harun, 2015). Selanjutnya pada tahun 2010, pemerintah mencanangkan kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter, dan lebih diperkuat melalui program Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK (Agung, 2017). Pada implementasinya, PPK dilakukan melalui tiga

pendekatan utama, yaitu **berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat**.

Penelitian ini akan berfokus pada salah satu lingkup pendidikan karakter yaitu berbasis budaya sekolah. Menurut Anggraini dan Zulfiati (2017), pembentukan karakter peserta didik dapat dilakukan melalui budaya sekolah yang sesuai dengan *grand design* pendidikan karakter, dikarenakan karakter pada budaya sekolah dibangun berlandaskan nilai-nilai yang berlaku. Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah didasarkan pada nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadian peserta didik ke arah positif, yang mampu membawa dampak baik kepada penguatan karakter. Pendidikan karakter di sekolah erat kaitannya dengan kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan atau dilakukan, dan dapat menyentuh ketiga domain (kognitif, afektif, dan psikomotorik) peserta didik, sehingga mereka tidak sekadar mengetahui, akan tetapi juga mau dan mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan karakter merupakan suatu penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan melalui contoh dan teladan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah (Sudarsono dan Sudrajat, 2016). Oleh karena itu, implementasi pendidikan karakter melalui budaya sekolah yang terstruktur menjadi hal yang mutlak dibutuhkan oleh sekolah untuk menciptakan budaya sekolah yang kondusif dan memudahkan penanaman nilai-nilai karakter untuk membentuk karakter peserta didik yang lebih kuat (Safitri, 2015).

Fakta yang ditemukan di lapangan, pelaksanaan PPK melalui budaya sekolah masih belum berjalan secara optimal, dimana peserta didik dalam melaksanakan kegiatan PPK berbasis budaya sekolah masih bergantung oleh peran kepala sekolah dan tenaga pendidik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik belum menyadari sepenuhnya tentang pentingnya pembiasaan PPK melalui budaya sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dan Zulfiati (2017), menyatakan bahwa peran warga sekolah (kepala sekolah, guru, tenaga administratif dan peserta didik) serta sarana dan prasarana dapat menjadi faktor pendukung ataupun penghambat dari penerapan PPK. Hal ini tergantung sejauh mana peran yang diberikan setiap komponen terhadap kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Satyawati (2015), dimana fenomena yang ada di lapangan menunjukkan bahwa walaupun sekolah telah menerapkan PPK, tetapi masih belum memiliki model pelaksanaan PPK yang dijabarkan dalam nilai-nilai prioritas karakter yang menjadi basis budaya yang akan dikembangkan di sekolah. Oleh sebab itu, setiap sekolah yang menerapkan PPK membuat model pengelolaan PPK yang dikembangkan dalam kegiatan rutin, spontan, keteladanan, dan pengkondisian dan melakukan pengawalan sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut.

Berangkat dari permasalahan yang muncul dari penelitian sebelumnya dan permasalahan yang ada di lapangan, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah di SMPN 21, Kota Malang, Jawa Timur. Permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah implementasi PPK berbasis budaya sekolah di SMPN 21 Kota Malang?; serta 2) bagaimanakah peran sekolah dalam mendukung implementasi PPK berbasis budaya sekolah di SMPN 21 Kota Malang?.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1 Konsep Penguatan Pendidikan Karakter**

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang melalui upaya pengajaran. Menurut Anggraini dan Zulfiati (2017), pendidikan adalah upaya secara sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik terhadap aspek kepribadian, jasmani dan rohani, dan dilakukan baik secara formal, informal dan nonformal. Sedangkan menurut Undang-undang Sisdiknas tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya melalui proses pembelajaran sehingga memiliki kecerdasan, kekuatan spiritual, akhlak mulia dan keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Karakter adalah bentuk watak, sifat, tabiat, akhlak yang sangat mendasar dan melekat pada pribadi seseorang, yang terbentuk dari hasil internalisasi yang digunakan sebagai landasan untuk berpikir dan yang dapat membedakan satu individu dengan individu lainnya. Menurut Khoirur (2018), karakter dapat menentukan cara pandang, tindakan, dan kemampuan seseorang merespon sesuatu.

Lebih lanjut menurut Khoirur, perubahan karakter merupakan dasar dari perubahan kualitas diri seseorang. Karakter dapat juga didefinisikan sebagai kepribadian dasar yang dibawa sejak bayi, akan tetapi dapat mengalami perubahan bila dihadapkan pada pengaruh interaksi dengan lingkungan (Satyawati, 2015). Sejalan dengan pendapat Satyawati, Agung (2017) menyatakan bahwa karakter merupakan sifat dan karakteristik yang berasal dari bentukan lingkungan melalui proses pembelajaran baik berasal dari keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, dan lain-lainnya. Perkembangan media sosial yang dewasa ini kian marak, dapat pula mempengaruhi karakteristik seseorang dan dapat mempengaruhi perilakunya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan perpaduan antara bawaan dan dari tempaan dan bentukan lingkungan, sehingga dapat diusahakan dan dipelajari. Dengan demikian, karakter dapat diubah dan dibentuk melalui pendidikan yang merupakan alat yang paling efektif dalam menanamkan nilai karakter kepada peserta didik.

Lickona (2012) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu upaya agar seseorang dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang penting untuk mewujudkan kebajikan. Selanjutnya menurut Lickona (2013), pendidikan memang salah satu senjata ampuh untuk mengatasi permasalahan karakter, karena pendidikan memiliki dua tujuan besar, yaitu membantu peserta didik menjadi pintar dan baik. Pendidikan karakter merupakan proses penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik agar memiliki kecerdasan moral, dapat membedakan hal yang benar dan tidak benar, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, yang ditanamkan melalui proses pengajaran dan pembiasaan, agar menjadi manusia yang berkarakter dalam berbagi dimensi (hati, pikir, dan raga, serta rasa dan karsa). Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan aspek pengetahuan yang baik saja (kognitif), akan tetapi juga mampu merasakan (afektif) nilai karakter yang baik, serta bisa melakukannya (psikomotor), yang mencakup pengembangan substansi, proses, suasana, atau lingkungan yang dapat mendorong seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik (Satyawati, 2015; Harun, 2015).

PPK merupakan satu rangkaian kegiatan dari beberapa definisi yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut Anshori (2017), PPK merupakan proses pembentukan dan mengembangkan potensi peserta didik agar berpikiran, berhati, dan

berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Sedangkan pengertian PPK menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 adalah gerakan pendidikan yang merupakan tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama tripusat pendidikan (satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat). Penguatan perlu dilakukan agar peserta didik dapat lebih mengetahui, merasakan, serta melakukan berbagai hal positif yang sudah berlaku untuk mencapai tujuan pendidikan.

## **2.2 Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter**

Menurut Lickona (2012), tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk menanamkan dan membentuk karakter sehingga terbentuk nilai yang menjadi sikap serta perilaku peserta didik menjadi sebuah kebiasaan. Secara lebih detail, Lickona mendeskripsikan tujuh alasan mengapa pendidikan karakter itu harus dibudayakan, diantaranya adalah: 1) merupakan jaminan agar dalam kehidupannya peserta didik memiliki kepribadian baik; 2) karakter yang baik berpengaruh terhadap prestasi akademik; 3) di luar ruang lingkup pendidikan, peserta didik tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya; 4) mengasah rasa toleransi dalam kehidupan bermasyarakat yang beragam; 5) permasalahan karakter terkait dengan realita sosial sehingga peserta didik mampu mencari pemecahan masalah; 6) mempersiapkan mental dan perilaku yang baik di tempat kerja; dan 7) memberikan pembelajaran tentang nilai budaya yang dapat meningkatkan peradaban suatu bangsa.

Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan yang salah, akan tetapi juga menanamkan kebiasaan baik sehingga peserta didik memahami serta mampu merasakan dan mau melakukan hal yang positif. Nilai-nilai penting dalam kehidupan sehari-hari dikembangkan serta dikuatkan sehingga perilaku peserta didik sesuai dengan nilai pada pendidikan karakter yang menjadi suatu pembiasaan dalam pembentukan watak positif (Tyas, 2018). Menurut Dalmeri (2014), tujuan pendidikan karakter adalah mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, yang diterima secara luas sebagai dasar perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Sedangkan tujuan program PPK yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1) membangun dan membekali peserta didik sesuai



dengan jiwa dan karakter Pancasila dalam menghadapi dinamika perubahan jaman; 2) mengembangkan tujuan pendidikan nasional yang menempatkan karakter sebagai roh dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia; serta 3) meningkatkan peran pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dan keluarga dalam penerapan nilai pendidikan karakter.

Pendapat lain menyatakan bahwa tujuan pendidikan karakter selain membentuk pribadi yang unggul, juga untuk meningkatkan kedisiplinan dan dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik (Taufik, 2014; Arthur, 2016). Hal ini sejalan dengan pendapat Lickona (2013) yang telah melakukan survei di wilayah negara Kanada, dan membuktikan bahwa ada keterkaitan antara karakter dan prestasi belajar. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2014) menghasilkan kesimpulan adanya perbedaan antara sebelum dan setelah peserta didik mengimplementasikan program pendidikan karakter. Mereka lebih antusias dalam mengikuti pelajaran, memiliki sikap hormat kepada guru, dan pada akhirnya perilaku tersebut membawa perubahan pada suasana kelas yang lebih kondusif.

### **2.3 Pengembangan Prinsip dan Nilai-nilai Karakter**

Apakah nilai-nilai yang dikembangkan terkait dengan pendidikan karakter sama di setiap negara di dunia?. Walaupun pada esensinya nilai-nilai positif yang diterapkan di seluruh dunia hampir sama, akan tetapi ternyata terdapat penekanan yang berbeda. Hal ini secara umum disebabkan karena terdapatnya perbedaan latar belakang agama, sosial, budaya, dan tingkat pendidikan (Sultoni, 2016).

Sebelum membandingkan nilai-nilai karakter yang dikembangkan di beberapa negara, terlebih dahulu akan dibahas tentang nilai-nilai yang dikembangkan oleh Thomas Lickona, salah satu tokoh pendidikan karakter. Menurut Lickona, terdapat tujuh nilai esensial yang disebut dengan karakter inti, selain tentunya nilai-nilai karakter lain yang harus dikembangkan. Ketujuh nilai tersebut antara lain adalah: 1) kejujuran; 2) belas kasih; 3) keberanian; 4) kebaikan hati; 5) kontrol diri; 6) kerjasama; dan 7) kerja keras.

Ketujuh nilai tersebut pada penerapannya diwujudkan dalam prinsip sebagai berikut: 1) mengembangkan nilai-nilai positif sebagai dasar dari karakter yang baik; 2) mendefinisikan karakter secara menyeluruh baik kognitif, afektif maupun

psikomotor; 3) memilih pendekatan yang sesuai dalam mengembangkan karakter; 4) membangun komunitas sekolah yang mendukung pelaksanaan PPK; 5) memberi peluang pada peserta didik untuk menerapkan perilaku positif; 6) menyusun kurikulum yang mendukung pelaksanaan PPK; 7) meningkatkan motivasi peserta didik; 8) melibatkan peran tenaga kependidikan; 9) meningkatkan inisiatif pendidik dalam jangka panjang bagi pengembangan karakter; 10) melibatkan peran serta keluarga dan masyarakat; serta 11) melakukan evaluasi terhadap penerapan PPK.

### **2.3.1 Prinsip dan Nilai Karakter di Amerika**

Pada pembahasan sebelumnya, Amerika telah mengadakan deklarasi Aspen yang memuat tentang etika nilai utama yang diajarkan dalam sistem pendidikan. Nilai-nilai tersebut menurut Irianto (2012) meliputi sikap dapat dipercaya, menghormati orang lain, tanggung jawab, adil, kasih sayang pada sesama, dan menjadi warga negara yang baik. Sedangkan menurut Raharjo (2010), terdapat 10 (sepuluh) nilai-nilai karakter di Amerika yang menjadi pilar diantaranya adalah: 1) dapat dipercaya; 2) rasa hormat dan perhatian; 3) tanggung jawab; 4) jujur; 5) peduli; 6) kewarganegaraan; 7) ketulusan; 8) berani; 9) tekun; dan 10) integritas.

Hampir senada dengan beberapa pendapat di atas, menurut Sultoni (2016), terdapat enam nilai yang diterapkan pada pendidikan karakter di Amerika, yaitu: 1) dapat dipercaya; 2) rasa hormat; 3) tanggung jawab; 4) keadilan; 5) merawat; dan 6) kewarganegaraan. Selanjutnya, nilai-nilai tersebut digunakan sebagai dasar 8 prinsip yang telah diaplikasikan, diantaranya adalah: 1) generasi muda merupakan penerus bangsa dan dunia, sehingga perlu upaya untuk mempersiapkan menjadi pribadi yang handal; 2) pada masa kini dan masa yang akan datang, warga negara yang memiliki karakter moral baik sangat diperlukan; 3) karakter moral memerlukan proses dan pembelajaran, sehingga harus dilakukan upaya sungguh-sungguh untuk mengembangkan nilai dan moral; 4) pendidikan karakter yang efektif didasarkan pada nilai-nilai etika inti, yang membentuk landasan masyarakat demokratis, khususnya rasa hormat, tanggung jawab, kepercayaan, kepedulian, keadilan, serta kebajikan dan kewarganegaraan; 5) nilai-nilai etis inti dapat melampaui perbedaan budaya, agama, dan sosio-ekonomi; 6) pendidikan karakter adalah tanggung jawab keluarga, komunitas, sekolah, dan lembaga pelayanan lainnya; 7) mengembangkan

karakter merupakan tanggung jawab bersama, sehingga semua komponen harus saling bekerja sama; 8) karakter dan perilaku remaja mencerminkan karakter dan perilaku masyarakat, oleh karena itu setiap orang dewasa memiliki tanggung jawab untuk mengajar dan memodelkan nilai-nilai etika inti, dan setiap institusi sosial memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan pengembangan karakter yang baik.

### **2.3.2 Prinsip dan Nilai Karakter di Singapura**

Untuk membentuk peradaban modern dan menjadi negara maju di kawasan Asia Tenggara, Singapura mengadaptasi nilai-nilai konfusianisme yang memuat lima nilai nasional yang meliputi: 1) bangsa dan negara merupakan prioritas utama, kemudian kepentingan individu, termasuk di dalamnya kepentingan keluarga; 2) pentingnya keharmonisan dalam keluarga; 3) harmonisasi ras dan agama; 4) upaya untuk menghindari konflik; dan 5) kegiatan kemanusiaan kepada orang-orang yang kurang beruntung (Hartati, 2018).

Sedangkan menurut Istiningsih (2016), Singapura memiliki tujuh nilai karakter yang diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu: 1) pengendalian emosi; 2) disiplin; 3) menghormati orang lain; 4) menjaga kebersihan; 5) retensi dalam bekerja; 6) menghargai pekerjaan orang lain; dan 7) memberikan layanan optimal dan komunikasi (bisnis).

Ketujuh nilai utama itu kemudian dijabarkan dalam 13 (tiga belas) prinsip, yaitu: 1) pembangunan karakter manusia; 2) kemampuan untuk membangun manusia kreatif; 3) kemampuan untuk membangun manusia yang memiliki etos kerja; 4) kemampuan manusia membangun karya yang lengkap; 5) kemampuan membangun manusia yang memiliki motivasi; 6) kemampuan membangun manusia yang mampu menghargai waktu; 7) kemampuan membangun manusia yang menghargai diri sendiri; 8) kemampuan membangun manusia yang dapat mencari untuk peluang; 9) kemampuan membangun manusia yang pandai untuk memanfaatkan peluang; 10) membangun perilaku mengucapkan terima kasih; 11) membangun manusia yang mampu bekerjasama dengan orang lain; 12) membangun mampu menghargai etika kerja; dan 13) membangun manusia berpikir secara objektif.

### **2.3.3 Prinsip dan Nilai Karakter di Malaysia**

Malaysia, seperti yang kita ketahui merupakan negara multikultural dengan tiga bangsa yang hidup bersama-sama (Melayu, Cina dan India). Pemerintah Malaysia membentuk suatu komite yang bertugas untuk merumuskan nilai- nilai karakter, dan akhirnya dihasilkan 16 (enam belas) nilai utama yang disebut Nilai Murni yang diajarkan pada peserta didik. nilai-nilai tersebut adalah: 1) baik hati; 2) mandiri; 3) sopan santun; 4) saling menghormati; 5) kasih sayang; 6) keadilan; 7) kebebasan; 8) keberanian; 9) kebersihan fisik dan mental; 10) kejujuran; 11) rajin; 12) kerjasama; 13) kesederhanaan; 14) rasa syukur; 15) rasional; dan 16) gotong royong (Balakrishnaan, 2010).

Nilai-nilai tersebut mendapatkan kritikan, karena dianggap mengandung pengulangan dan dalam implementasinya dinilai statis. Revisi yang dilakukan menghasilkan tujuh nilai, diantaranya adalah: 1) perkembangan diri; 2) kekeluargaan, 3) alam sekitar; 4) patriotisme; 5) hak asasi manusia; 6) demokrasi; dan 7) keamanan dan keharmonisan. Sedangkan prinsip yang dikembangkan dari ketujuh nilai itu adalah: 1) memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan orang lain; 2) berpegang teguh pada ajaran agama; 3) sikap perduli terhadap lingkungan; 4) menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis; 5) menghormati hak asasi manusia; 6) berjiwa patriotik; dan 7) mengamalkan prinsip demokrasi dalam kehidupan (Sultoni, 2016).

### **2.3.4 Prinsip dan Nilai Karakter di Indonesia**

Nilai-nilai karakter di Indonesia bersumber dari empat hal penting yang melekat pada bangsa Indonesia, yaitu: agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional (Sultoni, 2016). Selanjutnya pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, terdapat lima prioritas nilai utama yang saling berkaitan yang biasa disingkat Renamgotik atau Renamagi (Religiositas, Nasionalisme, Kemandirian, Gotong Royong dan Integritas). Kelima nilai-nilai tersebut dikembangkan dalam sub nilai, diantaranya adalah toleransi, tidak memaksakan kehendak, cinta tanah air, disiplin,

kreatif, musyawarah untuk mufakat, tolong menolong, jujur, serta anti korupsi, dan lain sebagainya.

Terkait dengan penerapan nilai-nilai karakter tersebut di level sekolah, sekolah dan guru diperbolehkan menambah atau mengurangi nilai-nilai tersebut sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah, tujuan, dan materi bahasan suatu mata pelajaran. Kelima nilai utama karakter tersebut diimplementasikan dengan beberapa prinsip antara lain adalah sebagai berikut: 1) menekankan pada potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu; 2) menerapkan keteladanan dalam penerapan PPK di lingkungan pendidikan; dan 3) dilakukan melalui pembiasaan dan terus menerus dalam kehidupan sehari-hari

Bila kita mengaitkan dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Lickona, terdapat beberapa nilai yang sejalan dengan nilai utama yang dikembangkan di Indonesia, diantaranya adalah ketulusan hati atau kejujuran. Nilai kejujuran pada saat ini dianggap sebagai salah satu hal penting, mengingat terjadinya berbagai fenomena yang ada di lapangan yang menunjukkan ketidakjujuran yang terjadi di lingkungan pendidikan. Bukan suatu hal yang tabu lagi adanya kebiasaan mensontek, bahkan pada kasus tertentu, guru memberikan jawaban ujian pada peserta didik. Menurut Fitria (2017), perilaku ketidakjujuran yang semakin membudaya merupakan salah satu tanda-tanda kehancuran suatu bangsa. Lebih lanjut menurut Fitria, karakter lain yang sangat terkait dengan kejujuran adalah kerja keras dan kerja sama. Dengan adanya kolaborasi antar kejujuran, kerja keras dan kerja sama akan menimbulkan suatu dampak yang luar biasa bagi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **2.4 Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah**

Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan sekolah yang mendukung pelaksanaan PPK yang melibatkan seluruh sistem, struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah. Menurut Zamroni (2011), budaya sekolah merupakan pola asumsi dasar, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang disepakati dan menjadi pegangan dan diyakini oleh warga sekolah agar memiliki pandangan yang tepat, memahami, berpikir, merasakan, dan bertindak yang tepat dalam menghadapi berbagai permasalahan. Budaya sekolah menurut Daryanto (2015) adalah nilai atau falsafah yang menjadi pedoman untuk



melaksanakan kebijakan sekolah terhadap unsur dan komponen sekolah sesuai dengan asumsi atau kepercayaan yang dianut personil sekolah.

Pengembangan PPK berbasis budaya sekolah merupakan kesatuan integral keseluruhan tata kelola sekolah, desain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), serta pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah. PPK berbasis budaya sekolah berfokus pada pembiasaan dan pembentukan budaya nilai-nilai utama PPK yang menjadi prioritas satuan pendidikan. Pembiasaan ini diintegrasikan dalam keseluruhan kegiatan di sekolah yang tercermin dari suasana dan lingkungan sekolah yang kondusif dan mampu memberikan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik. Penguatan nilai-nilai karakter berbasis budaya sekolah meliputi semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah (kepala sekolah, guru, konselor, dan tenaga administrasi saat berkomunikasi dengan peserta didik dengan menggunakan fasilitas yang berada di sekolah) (Satyawati, 2015).

Kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah dapat dilakukan dalam proses kegiatan rutin, spontan, keteladanan dan pengkondisian, yang diuraikan sebagai berikut: 1) kegiatan rutin, merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten setiap hari. Contoh dari kegiatan rutin yaitu: upacara bendera setiap hari senin, kegiatan senam, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, shalat berjamaah, budaya 5S (senyum, salam, sapa dan sopan santun) dan menaati peraturan sekolah. 2) kegiatan spontan, adalah kegiatan yang dilaksanakan pada keadaan tertentu. Contoh dari kegiatan spontan yaitu: membiasakan antri, membuang sampah pada tempatnya, menghargai pendapat orang, dan menengahi jika adanya perbedaan pendapat. 3) pengkondisian, yang dilaksanakan dengan cara penciptaan kondisi yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Contoh toilet yang selalu bersih, bak sampah di berbagai tempat, alat belajar ditempatkan secara teratur; serta 4) keteladanan warga sekolah, merupakan perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan yang dapat ditiru oleh peserta didik. Contoh dari kegiatan keteladanan yaitu berbicara yang sopan, berbahasa yang baik, berpakaian yang rapi, tidak terlambat, rajin mengerjakan tugas, memuji kebaikan orang lain, tidak iri terhadap keberhasilan orang. Kegiatan tersebut dilakukan di luar jam pembelajaran yang sesuai dengan situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan (Judiani, 2010; Safitri, 2015).

## **2.5 Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah**

Penerapan PPK pada dasarnya mengutamakan proses internalisasi nilai positif agar menjadi budaya bagi peserta didik. Penanaman nilai berupa pemahaman, tata cara untuk menerapkan dan menghidupkan nilai-nilai serta bagaimana peserta didik menerapkan nilai-nilai tersebut secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Furi, 2013). Agar nilai-nilai karakter dapat terintegrasi dengan baik, maka proses implementasi harus dilakukan secara terus menerus, melalui pembiasaan atau budaya sekolah. Terdapat tiga hal dalam implementasi penanaman pendidikan karakter di sekolah, antara lain pengetahuan tentang moral, perasaan tentang moral, dan tindakan moral (Lickona, 2012). Hal ini berarti bahwa pelaksanaan karakter tidak hanya sebatas mengetahui hal-hal yang baik saja, akan tetapi juga memiliki keinginan berbuat baik, melaksanakan hal baik tersebut berdasarkan pemikiran dan perasaan, yang kemudian secara nyata dilaksanakan dalam perilaku hidup.

Lickona (2012) menyebutkan bahwa setidaknya terdapat sepuluh alasan mengapa sekolah seharusnya dapat memberikan arahan secara menyeluruh tentang penerapan karakter, antara lain sebagai berikut: 1) kebutuhan yang semakin mendesak terkait pencerahan moral dan spiritual. Hal ini diakibatkan karena semakin meningkatnya berbagai tindakan kekerasan, serta semakin menurunnya kesadaran tentang pentingnya peran mereka dalam lingkungan hidup. 2) penghubung antara nilai dan sosialisasi. Masyarakat memerlukan pendidikan nilai yang naik agar bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Di Indonesia sendiri dikenal adanya tri pusat pendidikan (rumah, masyarakat dan sekolah). 3) pendidikan moral yang kurang didapat dari lingkungan di luar sekolah; 4) munculnya konflik di lingkungan masyarakat oleh berbagai perbedaan pandangan; 5) posisi demokrasi yang penting dalam pendidikan moral karena terbentuk dari pemerintahan dalam masyarakat; 6) segala hal terkait pendidikan selalu memiliki nilai penting; 7) setiap individu memiliki berbagai pertanyaan utama terkait moral; 8) pendidikan nilai di sekolah memiliki pandangan yang bermakna luas dan dapat mendukung perkembangan pendidikan; (9) pendidikan moral penting untuk membentuk perilaku yang dimulai dari perilaku guru; serta 10) pendidikan nilai merupakan suatu hal yang sangat mungkin dilaksanakan di lingkungan sekolah.

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, telah mengatur bahwa pendekatan berbasis budaya sekolah dapat dilakukan antara lain dengan cara: 1) menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah; 2) memberikan keteladanan antar warga sekolah; 3) melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah; 4) membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah; 5) mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; 6) memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan 7) khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Apabila mengacu pada modul Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, langkah awal yang perlu dilakukan dalam implementasi PPK berbasis budaya sekolah adalah dengan melakukan asesmen awal nilai utama yang akan menjadi fokus dalam pengembangan pembentukan dan penguatan karakter di lingkungan sekolah. Pemilihan nilai utama perlu untuk didiskusikan, dimusyawarahkan, dan didialogkan dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah (kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan peserta didik). Seluruh pemangku kepentingan menyepakati nilai utama yang menjadi prioritas dan tertuang dalam visi dan misi sekolah. Seluruh kegiatan, program, dan pengembangan karakter di lingkungan satuan pendidikan berpusat pada nilai utama tersebut, dan berlaku bagi semua komunitas sekolah.

Pemilihan nilai utama yang akan diterapkan pada masing-masing sekolah disesuaikan dengan nilai, visi dan misi, serta tujuan satuan pendidikan. Bersamaan dengan hal itu, dirumuskan pula sejumlah nilai pendukung yang dipilih dan relevan. Seluruh pemangku kepentingan menyepakati nilai utama yang menjadi prioritas serta nilai pendukung, yang akan menjadi komitmen bersama untuk membangun karakter peserta didik dan seluruh warga sekolah (Agung, 2017).

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Pendekatan dan Rancangan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara menyeluruh tentang pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah di SMPN 21 Kota Malang, Jawa Timur. Pelaksanaan lima nilai karakter utama PPK yang dijabarkan dalam subnilai, yang telah disesuaikan dengan visi serta karakteristik sekolah akan diteliti pada saat kegiatan masih berlangsung serta bersifat lebih mendalam dan terfokus pada pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah.

Pendekatan yang dilakukan terhadap masalah penelitian adalah pendekatan kualitatif didukung oleh data deskriptif sebagai hasil dari interpretasi data yang telah dihimpun. Penelitian ini tidak akan menguji hipotesis dan tidak akan menguji hubungan variabel, tetapi dititikberatkan pada pengumpulan data dengan mendeskripsikan keadaan saat ini yang terjadi di lapangan.

#### **3.2 Lokasi dan Latar Penelitian**

Lokasi penelitian di SMPN 21 Kota Malang, yang beralamat di Jalan Danau Tigi, Lesanpuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur. Peneliti memilih SMPN 21 sebagai lokasi penelitian karena sekolah ini telah ditunjuk sebagai sekolah rujukan penerapan PPK di Kota Malang sejak tahun 2016. Selain itu, SMPN 21 Kota Malang memiliki budaya sekolah yang baik dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan predikat sekolah Adiwiyata tingkat nasional pada tahun 2017.

#### **3.3 Kehadiran Peneliti di Lapangan**

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang bertugas untuk merencanakan, mengumpulkan, serta menganalisis data berupa hasil laporan dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan dalam menafsirkan berbagai fenomena terhadap semua subjek penelitian di lapangan, dengan menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dokumen yang terkait dengan implementasi program, serta alat pengambilan dokumentasi dan perekam hasil wawancara.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data primer pada penelitian ini didapatkan dari data hasil wawancara yang dilakukan kepada pengembang PPK sekolah, pendidik, dan peserta didik di SMPN 21 Kota Malang. Sedangkan data sekunder didapatkan dari sumber dokumen dan observasi. Penentuan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu cara menentukan sumber data dengan pertimbangan tertentu, yang bertujuan agar data yang diperoleh bisa lebih representatif dan dapat memenuhi tujuan dilakukannya penelitian (Sugiyono, 2011).

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, yaitu: 1) observasi partisipasi pasif, dalam artian bahwa peneliti dalam melakukan pengamatan tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Observasi ini ditujukan untuk menggambarkan situasi dari implementasi PPK berbasis budaya sekolah di SMPN 21 Kota Malang, Jawa Timur; 2) wawancara yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara sambil lalu yang dilakukan kepada Pengembang PPK di sekolah, guru, dan peserta didik; dan 3) studi dokumen atau studi literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen atau literatur tertulis berupa profil sekolah, dokumen-dokumen mengenai pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah, dan gambar-gambar atau foto-foto situasi dari kegiatan.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Tahap dalam menganalisis data adalah mengumpulkan data, kemudian mengolah data dan selanjutnya menganalisis data. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan fakta dan mendeskripsikannya, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap sumber data, baik yang diperoleh pada saat observasi, wawancara maupun dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2011), dalam menganalisis data penelitian kualitatif dengan model Miles dan Huberman memiliki tiga tahap yaitu: 1) reduksi data, yang dilakukan dengan cara merangkum dan memfokuskan pada data pokok dan hal penting saja. Data yang diperoleh akan diseleksi sehingga mendapat gambaran yang



jelas dan mengerucut pada tujuan awal penelitian; 2) penyajian data, dengan cara menginterpretasikan data teks yang bersifat naratif, grafik, matrik, bagan dan *flowchart*; dan 3) penarikan kesimpulan/ verifikasi, dimana peneliti membandingkan data dan mencari hubungan antar komponen kemudian menarik kesimpulan.

### **3.7 Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana informasi didapat dari sumber yang berbeda yang bertujuan untuk mengecek ulang derajat kepercayaan data. Pada penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengetahui implementasi PPK berbasis budaya sekolah, peneliti mencari data dengan melakukan teknik wawancara kepada sumber data yaitu PPK di sekolah, guru, dan peserta didik. Selanjutnya agar data hasil wawancara sesuai dengan yang terjadi di lapangan, maka peneliti melakukan teknik observasi dan dokumentasi dengan melihat dokumen yang ada di sekolah, serta mendokumentasikan kegiatan yang dijadikan obyek penelitian.

### **3.8 Tahap Penelitian**

Tahap penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian, yang dijabarkan sebagai berikut: 1) tahap awal. Pada tahap awal, peneliti membaca berbagai literatur untuk mengetahui teori-teori, kebijakan, serta kondisi ideal yang diharapkan. Peneliti juga telah melakukan observasi awal untuk mengetahui kondisi di lapangan, sehingga bisa merumuskan masalah sesuai dengan temuan yang diperoleh, dan mulai menyusun rancangan penelitian. 2) tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen panduan wawancara, dokumen, dan observasi, menelaah teori-teori yang relevan, serta mengidentifikasi data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif. 3) tahap akhir. Pada tahap ini peneliti melakukan tiga langkah, yakni menyusun laporan, melampirkan data penulisan laporan, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.

#### **4. Hasil Penelitian**

##### **4.1 Implementasi PPK Berbasis Budaya Sekolah**

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen, implementasi program PPK di SMPN 21 Kota Malang dapat diikhtisarkan ke dalam dua hal, yaitu: 1) tahap persiapan, yang meliputi tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan PPK; dan 2) pelaksanaan kegiatan yang dirancang dalam praktik penyelenggaraan PPK berbasis budaya di lingkungan sekolah.

##### **4.1.1 Tahap Persiapan Program PPK**

Pendidikan Karakter di SMPN 21 Kota Malang telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan semakin difokuskan pada tahun 2016, ketika sekolah menjadi salah satu sekolah rujukan PPK di Kota Malang. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan dari salah satu informan sebagai berikut:

Kalau penguatan pendidikan karakter, di SMPN 21 sudah sejak lama diberlakukan bahkan sebelum diinstruksikan oleh pemerintah. Hanya saja memang sejak tahun 2016, sekolah lebih serius dalam merancang berbagai kegiatan PPK, setelah ditunjuk oleh dinas pendidikan Kota Malang sebagai salah satu sekolah rujukan di Kota Malang (W/PPPK/A1/22-1-2019).

Dinas pendidikan Kota Malang telah melakukan sosialisasi program PPK, serta menunjuk beberapa sekolah sebagai sekolah rujukan PPK, dimana salah satunya adalah SMPN 21 Kota Malang. Menindaklanjuti hal tersebut, kepala sekolah membentuk tim pengembang PPK yang bertugas untuk membuat program kerja implementasi PPK. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh selama penelitian, tim pengembang PPK telah menyusun kegiatan PPK berbasis budaya sekolah berdasar modul konsep dan pedoman PPK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun pada perkembangannya terdapat Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang PPK, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2018 tentang PPK pada satuan pendidikan formal, akan tetapi peraturan tersebut lebih bersifat sebagai payung hukum, serta kurang terperinci dalam proses pelaksanaannya.

Kemudian peneliti lebih lanjut bertanya *grand design* seperti apa yang telah dirancang oleh tim PPK, informan menjawab sebagai berikut:

Tim PPK menyusun program kerja sesuai langkah di modul konsep dan pedoman PPK *mbak*. Dari menentukan nilai-nilai PPK yang diambil, kemudian menyusun jadwal PPK melalui kegiatan sekolah, mendesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), melakukan evaluasi peraturan sekolah, mengembangkan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, sampai proses sosialisasi (W/PPPK/A1/22-1-2019).

Langkah awal yang dilakukan oleh tim pengembang PPK adalah mengidentifikasi karakter yang akan dikembangkan sekolah. Dasar pemilihan karakter antara lain adalah nilai-nilai karakter yang telah diidentifikasi oleh direktorat yang meliputi nilai utama, ditambah dengan sub nilai pendukung. Sekolah diperbolehkan untuk mengambil nilai lain di luar nilai utama dan pendukung asalkan masih dalam tataran nilai karakter positif.

Selain mengambil nilai yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, faktor lain yang menjadi pertimbangan tim mengambil nilai karakter adalah kondisi sekolah dan peserta didik. Nilai-nilai karakter yang diambil sebenarnya juga harus selaras dengan visi sekolah, dimana SMPN 21 Kota Malang memiliki visi membangun sumber daya manusia yang unggul dalam berprestasi dan memiliki pribadi yang baik. Berdasarkan hal itu, nilai utama yang diterapkan di sekolah adalah religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas; sedangkan nilai pendukung antara lain disiplin, cinta tanah air, iman dan takwa (*imtak*), toleransi, rasa ingin tahu, tanggung jawab, jujur, kerjasama, menghargai pendapat/karya orang lain, peduli lingkungan, dan motivasi.

Ketika peneliti menanyakan apakah ada alasan khusus kenapa nilai-nilai itu yang diambil, informan menjawab:

Sesuai dengan kesepakatan bersama *mbak*, tentunya disesuaikan dengan kultur sekolah. Nilai-nilai tersebut yang dirasa penting bagi anak didik kami dan dalam pelaksanaannya bisa terpantau dengan mudah. Terutama peduli lingkungan, hal itu penting mengingat sekolah kami merupakan sekolah adiwiyata (W/PPPK/A1/22-1-2019).

Setelah mengidentifikasi nilai karakter, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim PPK adalah menyusun jadwal PPK melalui kegiatan sekolah. Tim pengembang telah merancang kegiatan berbasis karakter yang dilaksanakan seluruh warga sekolah serta menyusun jadwal secara terperinci dari hari, jam pelaksanaan, dimana kegiatan pelaksanaan, sampai pada petugas piket yang terdiri dari pendidik

yang memastikan bahwa kegiatan implementasi dapat berlangsung dengan baik. Total guru di SMPN 21 Kota Malang sebanyak 51 guru, sehingga setiap harinya, kurang lebih terdapat 10 guru yang secara terjadwal melakukan tugas piket.

Langkah selanjutnya adalah mendesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Langkah ini memerlukan kerjasama dengan masing-masing guru mata pelajaran, berdasarkan informasi sebagai berikut:

Kalau desain KTSP tentunya harus koordinasi dengan semua guru, karena terkait dengan Silabus dan RPP. Saat ini nilai-nilai PPK kan harus tersurat di Silabus dan RPP *ya mbak* (W/PPPK/A1/22-1-2019).

Pada dasarnya tim pengembang PPK hanya melakukan pendampingan terhadap guru, karena untuk memasukkan nilai karakter yang ada sebenarnya merupakan tugas dan wewenang guru masing-masing mata pelajaran. Tentunya hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum (wakasek kurikulum) yang menangani tentang pengembangan silabus dan RPP, serta monitoring dari kepala sekolah.

Penerapan program PPK berarti perlu juga melakukan evaluasi terhadap peraturan sekolah, serta mengembangkan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Terdapat beberapa peraturan sekolah yang akhirnya dirubah, untuk menyesuaikan dengan program kerja yang telah dirancang oleh tim PPK. Misalkan saja untuk peraturan jam masuk sekolah, pada saat ini lebih awal yaitu pada pukul 06.45 dari sebelumnya pukul 07.00 sebelum diterapkannya program PPK. Contoh lain adalah terkait dengan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, dimana sekolah semakin memfokuskan untuk meng“infus” nilai-nilai yang bermuatan PPK di setiap kegiatan yang ada, tidak hanya sekedar kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat siswa saja.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana cara untuk melakukan proses sosialisasi, informan menjawab sebagai berikut:

Proses sosialisasi kami lakukan secara menyeluruh tidak hanya pada tataran siswa, guru, serta karyawan sekolah saja, akan tetapi kami juga mengundang komite sekolah serta wali murid agar mengetahui adanya program PPK ini. Bagaimanapun peran orang tua sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program (W/PPPK/A1/22-1-2019).

Suatu program tidak akan dapat berjalan dengan baik, tanpa melalui proses sosialisasi yang dilakukan pada seluruh ekosistem pendidikan di sekolah. Sosialisasi sangat penting dilakukan agar seluruh komponen sekolah memahami nilai-nilai dan karakter yang dikembangkan, sehingga terdapat komitmen yang kuat untuk mewujudkannya. Proses sosialisasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan pada saat program kerja telah selesai dirancang oleh tim pengembang PPK. Hal ini juga bertujuan agar terdapat masukan bila sekiranya terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan agar pelaksanaan PPK bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Selain itu, sekolah juga melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan sekolah, dari petugas keamanan dan kebersihan, petugas koperasi dan petugas kantin sekolah.

Proses sosialisasi selanjutnya dilakukan kepada peserta didik. Berdasarkan data hasil wawancara dengan siswa, diketahui bahwa sosialisasi implementasi PPK berbasis budaya sekolah dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: guru melakukan sosialisasi pada saat di kelas, serta kepala sekolah yang menguatkan kembali pada saat kegiatan upacara. Selanjutnya, sosialisasi juga dilakukan dengan mengundang komite sekolah dan wali murid, agar mereka juga memahami program kerja yang telah dirancang, dan turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

#### **4.1.2 Kegiatan Implementasi PPK Melalui Budaya Sekolah di SMPN 21 Kota Malang**

Untuk menggali informasi terkait dengan praktik penyelenggaraan PPK berbasis budaya di lingkungan sekolah, peneliti menemukan empat kegiatan yang dilaksanakan, sesuai dengan wawancara berikut:

Tim pengembang PPK telah merancang empat kegiatan pembiasaan melalui pengelolaan kegiatan rutin, spontan, keteladanan, dan pengkondisian. Kami telah menyusun kegiatan tentunya berdasar nilai yang telah diambil dengan mempertimbangkan sarpras sekolah. Penjadwalan juga penting untuk dilaksanakan agar kegiatan yang disusun berjalan efektif (W/PPPK/A2/22-1-2019).

*Pertama*, implementasi kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah. Di SMPN 21 Kota Malang kegiatan rutin yang dilaksanakan seperti berikut: 1) budaya 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun). Budaya 5S dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik dengan berdiri di lobi sekolah menyambut peserta didik

dengan berjabat tangan. Selain itu, peserta didik juga melakukan budaya 5S setiap kali bertemu dengan pendidik dan tenaga kependidikan di area sekolah selama jam sekolah berlangsung; 2) kegiatan keagamaan: Sekolah mengadakan kegiatan sholat berjamaah (sholat dhuha, sholat duhur, dan sholat Jum'at). Selain itu, siswa juga membaca Asmaul Husna, hafalan surat pendek Juz Amma untuk yang muslim (Senin dilaksanakan di dalam kelas, Selasa sampai Jum'at dilaksanakan di lapangan bersamaan dengan kegiatan literasi). Maksud kegiatan ini adalah menumbuhkan karakter siswa yang religius dan memiliki tanggung jawab; 3) menyanyikan lagu kebangsaan dan daerah: siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza (setelah kegiatan literasi dan keagamaan di lapangan), dan menyanyikan lagu daerah setelah pembelajaran berakhir di dalam kelas. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan siswa lebih memiliki rasa nasionalisme; 4) upacara rutin: sekolah memiliki jadwal upacara setiap hari senin. Hal ini dilakukan untuk menanamkan nilai kedisiplinan dan menumbuhkan sikap nasionalisme siswa; 5) Jum'at bersih: sekolah memiliki kegiatan semenit memungut sampah yang dilakukan setiap hari Jum'at. Kegiatan ini ditujukan agar siswa memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah sekaligus pembelajaran terhadap kebersihan lingkungan.

*Kedua*, kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini tercermin pada saat diperlukan sumbangan sukarela insidental dilakukan secara spontanitas bila terjadi musibah sehingga mampu melatih jiwa sosial. Selain itu sekolah juga menuntut siswa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, dengan tujuan untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab akan lingkungan hidup. Membiasakan berjabat tangan dan memberi salam juga dibiasakan sebagai wujud implementasi budaya sekolah.

Kegiatan spontan juga terlihat dengan jelas pada saat jam sholat berjamaah, jam istirahat, serta beberapa kejadian lain selama penelitian berlangsung. Pada saat sholat berjamaah dilakukan, budaya disiplin dan antri sangat terlihat. Dikarenakan masjid yang berukuran kurang begitu luas, maka siswa putra melakukan sholat berjamaah, disusul kemudian dengan siswi putri. Selama masa menunggu, siswi putri mengambil air wudhu, kemudian duduk dengan tertib menunggu siswa putra selesai menjalankan sholat berjamaah. Siswa putra secara bergotong royong menata karpet yang sebelumnya digulung di teras masjid agar nyaman dalam melakukan ibadah.



Kalau yang menata karpet dilakukan secara spontan saja. Tidak ada jadwal petugas piket. Kecuali untuk pokja air wudhu yang bertugas untuk menjaga kebersihan pembuangan air wudhu serta memanfaatkannya untuk menyiram tanaman, itu baru terjadwal (W/PPPK/A2/22-1-2019).

Melalui observasi yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa kebiasaan antri juga terlihat di kantin sekolah saat jam istirahat berlangsung. Seluruh siswa mengantri sesuai dengan garis antrian pada enam konter makanan yang telah disiapkan sekolah dengan tertib. Setelah selesai menyantap makanan atau minuman, siswa juga dengan segera meletakkan piring atau gelas kotor di bak plastik di setiap konter makanan. Hal ini membudayakan sikap mandiri dan tanggung jawab (O/S/A2/22-1-2019 dan (O/S/A2/25-1-2019).

Kegiatan ini juga dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang lain apabila mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari siswa yang harus dikoreksi pada saat itu juga, sehingga siswa tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik tersebut. Misalkan saja membuang sampah tidak pada tempatnya, berperilaku kurang sopan, dan berteriak-teriak sehingga mengganggu orang lain.

Kegiatan spontan juga dilakukan oleh sekolah dalam mengatasi permasalahan yang bersifat kasuistik. Apabila terdapat siswa dengan perilaku yang kurang sesuai dengan peraturan, sekolah akan terlebih dahulu melakukan pendekatan secara personal kepada siswa, maupun bekerjasama dengan wali murid bila diperlukan untuk mempermudah pendampingan. Salah satu permasalahan yang ada, diungkap oleh informan sebagai berikut:

Tidak bisa kami pungkiri sistem zonasi memang mempengaruhi keadaan sekolah *mbak*. Terjadi berbagai masalah misalkan saja pencurian HP, siswa ada yang ketahuan minum minuman keras, perundungan terhadap siswa lain, dan mulai ada yang bolos sekolah. Hal ini menuntut pihak sekolah mulai memperbaiki sistem pendampingan, untuk membimbing siswa dalam mencari solusi terbaik sebelum melibatkan wali murid (W/PPPK/A2/22-1-2019).

Pendekatan secara personal dengan cara pendampingan terhadap siswa dirasa efektif untuk mengembangkan kepribadian yang lebih baik. Hal ini terbukti pada beberapa kasus yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dan berdasarkan pengalaman yang ada lebih mampu untuk *menyentuh* siswa untuk berperilaku lebih positif. Untuk kasus yang sudah tidak tertangani lagi, dengan terpaksa pihak wali

murid diundang untuk berdiskusi, dan sekiranya tidak membawa perubahan, pihak sekolah akan mengembalikan siswa kepada orang tuanya.

*Ketiga*, keteladanan yang dilakukan oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Tidak hanya kepala sekolah, guru, karyawan administrasi saja, akan tetapi petugas keamanan dan kebersihan sekolah, petugas koperasi, sampai petugas kantin juga harus memahami arti penting tentang pemodelan yang baik bagi para siswa. Pihak sekolah memahami bahwa pelajaran atas nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan karakter yang pertama bagi siswa adalah karakter diri mereka sendiri, yaitu bagaimana kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah bersikap di antara mereka sendiri, serta bagaimana mereka bersikap, memperlakukan, dan melayani siswa.

SMPN 21 kota Malang menerapkan keteladanan yang sifatnya untuk ditularkan. Secara sederhana dapat dipahami bahwa perilaku dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan serta petugas sekolah lain memberikan contoh dengan tindakan-tindakan baik, yang dapat menjadi panutan. Hal tersebut dapat menjadikan siswa mulai mencontoh, mengikuti, kemudian jadi terbiasa sehingga karakter tersebut nantinya akan tertanam kuat pada diri siswa.

Salah satu informan menyatakan bentuk keteladanan yang diterapkannya adalah disiplin serta mengikuti sholat berjamaah, sehingga siswa juga akan membiasakan diri untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan rajin melaksanakan sholat berjamaah; berikut merupakan hasil wawancaranya:

Kalau saya pribadi, saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Saya juga selalu berupaya untuk melakukan kebiasaan sholat berjamaah di masjid *mbak*, anak-anak juga akan melihat bila kita memberi contoh yang baik mereka akan mengikuti. Pelan-pelan mereka akan sadar bahwa disiplin itu penting, terutama sholat tepat waktu (W/TPDK/ A2/25-1-2019).

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap siswa terkait dengan kegiatan shalat berjamaah ini. Dari hasil wawancara yang dilakukan, kegiatan pembiasaan yang terkesan *memaksa* ini, pada awalnya dirasa berat oleh siswa. Akan tetapi dengan pembiasaan yang dilakukan setiap hari maka siswa tidak lagi merasa terbebani untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

*Keempat*, adalah kegiatan pengkondisian, dimana sekolah menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah yang mendorong terbentuknya perilaku terpuji. Dari hasil wawancara diketahui bahwa terdapat berbagai peraturan telah dirancang untuk membiasakan hal-hal positif terhadap siswa, sebagai berikut:

Pengkondisian dilakukan misalnya di area toilet dan kantin. Bisa dilihat bahwa terdapat berbagai tata tertib yang wajib diikuti siswa. Demikian juga berbagai poster bertuliskan hal-hal baik dan bersifat memotivasi siswa, yang memang sengaja dipasang di sepanjang koridor kelas. Kami percaya bahwa dengan pengkondisian yang ada bisa tertanam nilai-nilai positif pada diri siswa (W/PPPK/ A2/22-1-2019).

Ketika peneliti melakukan observasi, di area toilet, kantin dan segenap penjuru sekolah memang telah dilakukan pengkondisian agar nilai-nilai positif lebih mudah terinternalisasi pada diri siswa. Di depan toilet terdapat rak khusus sepatu, dan siswa masuk ke toilet dengan menggunakan sandal yang telah tersedia. Di pintu masuk ditempel doa masuk kamar mandi, aturan masuk kamar mandi yang dikenal dengan slogan SPS (Siram, Pipis, Siram), deskripsi tugas piket kamar mandi, jadwal pokja kamar mandi, bahkan terdapat prosedur ke kamar mandi untuk siswa. Bila dilihat di setiap toilet terdapat pula berbagai aturan, misalkan saja mematikan lampu dan kran air setelah pemakaian, serta menjaga kebersihan toilet. Peraturan di area kantin juga telah tersurat dengan jelas, antara lain adanya tata tertib pengunjung kantin, dan disediakan garis antrian di kantin sekolah pada setiap konter makanan untuk membudayakan kebiasaan antri. Disediakan pula semacam bak plastik di setiap konter, dimana siswa meletakkan sendiri piring/ gelas kotor yang telah mereka pakai.

Pengkondisian juga diciptakan dengan terdapatnya berbagai poster yang bermuatan nilai, norma, serta kebiasaan-kebiasaan karakter positif. Berbagai seruan yang tertulis pada poster yang dipajang di seluruh penjuru sekolah dapat dengan mudah ditemukan dan terbaca, misalkan saja poster yang berisi seruan “Stop Tawuran”; “Jadikan Lingkunganmu Bersih, Sehat, Dan Nyaman”; “Lingkungan Bersih Tanpa Sampah Membuat Hidup Lebih Indah Dan Sehat”; “*Stop Bullying*” dan masih banyak seruan lainnya.

Lebih lanjut, peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi PPK berbasis budaya sekolah melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan dan

pengkondisian memiliki dampak positif dalam merubah karakter peserta didik. Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan yang menjelaskan bagaimana hasil penerapan kebijakan program PPK berbasis budaya sekolah:

Kalau bicara tentang perubahan karakter siswa jelas terlihat ya *mbak*, karena kan kegiatan PPK ini dilaksanakan melalui rutinitas dan pembudayaan secara terus-menerus, jadinya anak sudah terbiasa melakukan kegiatan yang sudah terprogram tanpa harus *dioprak-oprak* lagi seperti dulu. Mungkin memang belum maksimal, tapi ya jauh *lah* kalau dibanding dengan sebelum adanya program (W/PPPK/A2/22-10-2019).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, perubahan perilaku yang telah membudaya dan terinternalisasi pada diri seluruh ekosistem sekolah tidak hanya nampak pada kegiatan sholat berjamaah saja, akan tetapi juga perilaku positif lain. Misalkan saja membuang sampah, dimana dahulu kesadaran untuk membuang sampah saja belum ada, sekarang ini tanpa diingatkan mereka sudah tau apa yang mesti dilakukan.

Demikian pula dengan adanya budaya 5S. Informan, yang merupakan salah satu tenaga pendidik menyatakan bahwa walaupun terkesan sederhana, ternyata kegiatan ini memberi pengaruh besar terhadap karakter peserta didik, dimana mereka lebih menghargai guru dan juga teman sejawatnya. Kemudian terkait dengan kesadaran menjaga kebersihan area toilet. Pokja kamar mandi yang bertugas untuk membersihkan area kamar mandipun menyatakan bahwa memiliki tanggung jawab kamar mandi juga tidak membuat mereka jijik, karena kebersihan area toilet masuk dalam kategori bersih, dan masih banyak contoh yang lain yang bisa diamati melalui aktivitas sehari-hari peserta didik.

#### **4.2 Peran Sekolah Dalam Mendukung Implementasi PPK**

Peran sekolah di SMPN 21 Kota Malang dikembangkan sejalan dengan pelaksanaan PPK secara terintegrasi baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Pelaksanaan pendidikan karakter dapat terealisasi dengan baik melalui penanaman nilai-nilai karakter dalam kultur sekolah, diantaranya melalui: 1) penyediaan fasilitas yang mendukung implementasi program PPK; 2) berbagai aktivitas pada program sekolah; 3) pelibatan peran wali murid; serta 4) evaluasi pelaksanaan program.

#### 4.2.1 Penyediaan Fasilitas Pendukung Program PPK

Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana yang mendukung sangat penting dalam pelaksanaan PPK. SMPN 21 Kota Malang telah membangun berbagai fasilitas penunjang yang dapat mempermudah implementasi PPK di sekolah. Hal ini diketahui berdasarkan wawancara berikut:

Pelaksanaan PPK disini sangat didukung oleh sarana dan prasarana yang ada *mbak*, jumlah toilet yang mencukupi, dan antara toilet putra dan putri yang terpisah. Kemudian di depan kelas ada tempat sampah dan tempat cuci tangan, ada juga *green house*, rumah kompos dan bank sampah. (W/PPPK/A3/22-1-2019).

Dari hasil observasi, salah satu hal yang menurut peneliti paling menonjol adalah adanya *green house*. Tanaman anggrek dibudidayakan secara khusus di *green house* yang mengajarkan nilai kewirausahaan pada siswa. Selain itu, terdapat juga hewan peliharaan (burung dan ayam) di *green house*, yang bertujuan untuk mengajarkan tanggung jawab memelihara hewan dan kasih sayang terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang lain.

Sekolah juga memanfaatkan ruang belakang kelas untuk tanaman toga (lidah buaya) serta tanaman hidroponik lainnya. Di depan setiap kelas dapat dengan mudah kita temukan tanaman gantung hias yang ditanam di dalam botol plastik yang telah dimodifikasi dan disusun sedemikian rupa. Siswa secara bergantian memiliki jadwal untuk memberikan kompos, menyiram tanaman yang menanamkan sikap tolong menolong, jujur dan peduli lingkungan. Selain itu sekolah juga memiliki rumah kompos yang mengolah daun menjadi pupuk di area sekolah dan bank sampah untuk memilah limbah sesuai jenisnya (botol, koran dan kardus).

Peneliti kemudian menanyakan, apakah sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh sekolah telah dimanfaatkan secara optimal, informan menyatakan sebagai berikut:

Semua sudah difungsikan dan dimanfaatkan dengan baik *mbak*. Hanya saja anak-anak sepertinya masih belum memiliki kesadaran dengan barang pribadinya yang hilang (W/PPPK/A3/22-1-2019).

Salah satu hal lain yang menarik adalah sikap jujur yang coba ditanamkan kepada siswa, dengan cara menyediakan etalase khusus yang diperuntukkan bagi barang yang hilang. Apabila siswa menemukan sesuatu barang yang bukan miliknya,



maka dia akan melapor ke bagian kesiswaan. Bila barang berupa buku, kacamata, sepatu, kotak tempat makan, mukena, atau peralatan sekolah lainnya, petugas akan meletakkan barang temuan tersebut di etalase barang hilang. Bila barang yang ditemukan berupa uang, maka petugas mengumumkan melalui pengeras suara, agar siswa yang merasa kehilangan segera melapor.

Berdasarkan hasil penelitian, kejujuran siswa nampak, dari berbagi barang yang dipajang di etalase barang hilang. Hal ini berarti siswa memiliki kesadaran untuk tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Hanya saja, di sisi lain ternyata siswa kurang memiliki rasa kepemilikan barang. Terbukti, banyak sekali barang hilang yang sampai saat ini belum diambil oleh pemiliknya, padahal barang tersebut termasuk barang yang cukup penting dan menunjang pembelajaran siswa.

#### **4.2.2 Aktivitas Program Sekolah Penunjang Implementasi PPK**

Secara institusional, peran sekolah tidak hanya memfasilitasi penerapan PPK melalui sarana dan prasarana yang mendukung saja, akan tetapi juga memberikan ruang yang luas pada segenap potensi siswa. Hal ini dilakukan melalui kegiatan yang tidak hanya terfokus pada kokurikuler dan ekstrakurikuler secara seimbang, akan tetapi juga program unggulan lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh salah satu informan sebagai berikut:

PPK tidak hanya kami laksanakan pada kegiatan intrakurikuler saja *mbak*, tapi juga melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kita memiliki 20 kegiatan, dimana Pramuka merupakan ekskul yang bersifat wajib, dan lainnya *optional* yang dapat dipilih siswa berdasarkan bakat dan minatnya (W/KM1/A3/22-1-2019).

Pada pelaksanaan kegiatan kokurikuler, bagi kelas 7, 8 dan 9 dilakukan pada saat siswa mengerjakan tugas guru dengan didampingi wali kelas atau guru mata pelajaran secara mandiri. Kegiatan ini berlangsung di luar jam sekolah, yaitu dilaksanakan pada pukul 14.20-15.00. Khusus bagi kelas 9 dilakukan pula bimbingan belajar setiap hari Selasa-Jum'at pada pukul 06.00-07.00, untuk lebih mempersiapkan siswa dalam menghadapi USBN/ UN.

Kaitannya dengan perkembangan kepribadian anak, terdapat kegiatan Pendidikan Informasi Konseling Remaja (PIKR), yang didampingi konselor untuk mendapat materi Pendidikan dan Informasi Konseling Remaja, dimana dalam 1



minggu setiap jenjang mendapat 1 kali jadwal PIKR. Sekolah juga telah memilih siswa yang berpotensi sebagai kader dari kegiatan PIKR, dan memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada sesama temannya di kelas.

Untuk kegiatan ekstrakurikuler, sekolah menawarkan berbagai kegiatan sehingga siswa dapat memilih sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya. Di SMPN 21 Kota Malang, kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat religi antara lain baca tulis Al Qur'an, seni baca Al Qur'an, seni musik islami. Kegiatan yang bersifat seni yaitu seni tari, seni lukis, seni musik, paduan suara, dan drum band. Ketiga, kegiatan yang bersifat pengetahuan antara lain karya ilmiah remaja, *English club*, serta Olimpiade (Matematika, IPA dan IPS). Keempat, adalah kegiatan yang bersifat olah raga, diantaranya: futsal (baik putra/ putri), bola volly, renang, bola basket; kegiatan serta Paskibra. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam sekolah antara pukul 15.00-17.00 (D/DS/A3/22-01-2019).

Informasi tambahan yang diungkap oleh salah satu tim pengembang PPK, untuk memperkuat penanaman karakter siswa, sekolah juga telah merancang suatu program Pembiasaan Adiwiyata:

Pelaksanaan program Pembiasaan Adiwiyata ini, dilakukan dengan cara membagi siswa menjadi 13 kelompok kerja (pokja), dimana 1 pokja terdiri dari 2-3 orang. Masing-masing pokja dibimbing oleh guru selaku penanggung jawabnya *mbak*, jadi anak-anak tetap dalam bimbingan (W/PPPK/A3/22-01-2019).

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang ada, pokja yang telah disusun yaitu: 1) pokja biopori yang bertugas untuk memantau biopori yang telah ada untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda daerah Sawojajar; 2) pokja IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang bertugas untuk pengelolaan limbah air wudhu; 3) pokja *green house* yang bertugas untuk memelihara tanaman dan hewan; 4) pokja kamar mandi yang bertugas untuk membersihkan area kamar mandi; 5) pokja bulletin dan mading yang bertugas untuk membuat bulletin dan mading kreatif agar siap dilombakan; 6) pokja komposting yang bertugas untuk membuat kompos; 7) pokja daur ulang yang bertugas untuk memanfaatkan limbah yang ada menjadi kerajinan tangan; 8) pokja kantin sehat yang bertugas untuk menjaga kebersihan kantin; 9) pokja hidroponik yang bertugas untuk merawat tanaman hidroponik; 10) pokja BSM (Bank Sampah Malang) yang bertugas untuk memilah limbah sesuai

jenisnya (botol, koran dan kardus); 11) pokja toga yang bertugas untuk memelihara tanaman sehat; 12) pokja Kebersihan ruang guru dan kelas yang bertugas untuk memelihara kebersihan ruang guru dan kelas; dan 13) pokja UKS yang bertugas untuk penanganan terhadap kesehatan siswa.

Sekolah juga memiliki berbagai macam program unggulan, yang merupakan tindak lanjut dari prestasi Kota Malang di bidang lingkungan hidup, yaitu penghargaan Adipura Kencana untuk kategori kota besar. Pemerintah Kota Malang melakukan berbagai terobosan dan inovasi berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di area sekolah:

Dinas Kota Malang bekerjasama dengan Radar Malang mengadakan kegiatan *Greenschool Festival* *mbak*. Isu yang muncul berkaitan dengan SEKAM (sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan). Kami selalu berusaha membuat inovasi, dan Alhamdulillah mampu menyabet berbagai kejuaraan. Sejak 2014 kami memenangkan lomba katagori inovasi makanan dari buah unik, serta katagori literasi dan teknologi (W/PPPK/A3/22-01-2019).

SMPN 21 Kota Malang menggalakkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan SEKAM yang pro-lingkungan. Sekolah telah bekerja sama dengan Bank Sampah Malang (BSM) dalam mengatasi masalah sampah. Selain itu, dalam pengelolaan sampah juga dilakukan pembuatan produk-produk daur ulang berupa kerajinan yang terintegrasi pada pembelajaran prakarya dan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Pembuatan kompos (*composting*) juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di sekolah untuk memanfaatkan sampah organik yang berupa daun-daunan.

Penghematan dalam bidang energi, khususnya energi listrik dilakukan dengan pengecekan pemakaian daya listrik secara berkala. SMPN 21 Kota Malang memasang beberapa poster ataupun slogan untuk penghematan energi di beberapa tempat yang terdapat sambungan listrik.

Program unggulan dalam bidang keanekaragaman hayati berupa budidaya lidah buaya dan mengkudu. Sekolah telah melakukan berbagai inovasi terhadap terhadap tanaman tersebut, dengan mengolahnya menjadi makanan seperti puding mengkudu, es lidah buaya, kripik mengkudu, oseng-oseng daun mengkudu, dan es krim mengkudu. Selain budidaya lidah buaya dan mengkudu, SMPN 21 Kota Malang juga memiliki tanaman obat keluarga dan hidroponik sayuran.

Program unggulan dalam bidang pengolahan air adalah penyediaan air minum Zona Air Minum Prima (ZAMP). ZAMP merupakan air PDAM siap minum. Air minum ZAMP ini tidak diragukan dalam kesehatan karena pengecekan terhadap PH air selalu dilakukan secara berkala dan kontinyu. Air minum ini bebas digunakan oleh seluruh warga dan *stake holder* SMPN 21 Kota Malang. Selain ZAMP, sekolah juga melakukan pengolahan limbah air wudu. Limbah air wudhu yang digunakan oleh warga dan *stake holder* disalurkan pada sebuah kolam untuk pembudidayaan ikan lele.

Makanan dan minuman juga menjadi salah satu perhatian pihak sekolah, dengan cara memiliki kantin sehat. Pada kantin sehat ini seluruh makanan bebas pengawet, perasa, dan pewarna. Selain itu, kantin yang terdapat di SMPN 21 Kota Malang sudah menghindari penggunaan bungkus makanan dan minuman dari plastik.

Selain itu, SMPN 21 Kota Malang selaku sekolah Adiwiyata juga memiliki mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan silabus tersendiri, yang disesuaikan pula dengan kondisi sekolah. Mata pelajaran PLH ini diajarkan 1 jam pelajaran setiap minggunya, serta terdapat ujian tulis dan praktik yang merupakan salah satu prasyarat lulus ujian sekolah.

#### **4.2.3 Peran Wali Murid Terhadap Pelaksanaan PPK**

Mengingat pentingnya sinergi antara sekolah serta lingkungan keluarga, wali murid dilibatkan untuk turut serta dalam penanaman karakter terhadap siswa. Sekolah telah mensosialisasikan program PPK kepada wali murid, dan mengharapkan adanya keterlibatan aktif dari orang tua siswa. Di lingkungan keluarga, wali murid diharapkan untuk selalu mengawasi karakter anak, membimbing anak melakukan tata karma dan sopan santun, rajin beribadah, hormat kepada orang tua, dan penanaman karakter lainnya.

Selama ini antara pihak sekolah dengan wali murid telah menjalin kerjasama dengan baik, seperti yang dinyatakan informan sebagai berikut:

Setiap wali kelas selalu memiliki *group whatsapp* sehingga komunikasi dengan wali murid dapat berjalan dengan baik. Kadang kami mengingatkan wali murid sekiranya ada kegiatan yang memerlukan pantauan langsung di lingkungan keluarga, atau sekedar mengumumkan pengumuman-pengumuman penting

terkait kegiatan sekolah. Hal ini sangat efektif dan membantu perkembangan anak, dan dapat memantau perilaku siswa baik di sekolah maupun di rumah (W/PPPK/A3/22-1-2019).

Adanya komunikasi yang baik antara sekolah dan wali murid turut membantu menguatkan karakter siswa dalam lingkup keluarga, yang berimbas pada keberhasilan implementasi PPK di lingkungan sekolah. Dari hasil penelitian, peran orang tua sangat besar dalam pembudayaan nilai karakter anak. Diantaranya adalah pemantauan terhadap kegiatan religious anak di lingkungan masyarakat, dimana orang tua akan menandatangani laporan kegiatan ibadah sholat dan baca Al-qur'an yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Suatu hal yang sangat menarik ketika peneliti menemukan bahwa orang tua banyak yang tidak menandatangani laporan kegiatan bila anaknya tidak mengaji/ melaksanakan sholat di lingkungan rumah.

Selain itu, peran orang tua sangat terlihat pada saat kegiatan kokurikuler berupa bimbingan belajar atau uji coba pengerjaan soal UN serta peran serta pada kegiatan peringatan hari besar keagamaan, dan kegiatan wisuda dengan menyediakan konsumsi secara sukarela. Berdasarkan penelitian, terdapat dua kelas yang dibangun berdasarkan hasil sumbangan dari wali murid, sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik. Untuk kegiatan di luar sekolah, wali murid secara aktif juga menyumbangkan dana setiap tahun untuk acara edukasi untuk seluruh warga sekolah ke taman safari prigen.

Peran orang tua dalam peringatan hari besar keagamaan sangat nampak, terutama dalam memberikan bantuan finansial. Untuk siswa muslim akan diadakan pondok Ramadhan dengan menginap sehari di sekolah dan mengundang penceramah, sedangkan untuk siswa non-muslim dilakukan di luar sekolah dengan mengadakan kebaktian.

Orang tua siswa juga terbukti memberikan respon yang positif terhadap pelaksanaan program dan peraturan sekolah yang telah disepakati. Salah satu contohnya adalah tingkat keterlambatan siswa yang sangat rendah. Sejak diberlakukan PPK siswa masuk lebih pagi yaitu pukul 06.45 dari sebelumnya adalah pukul 07.00. Bila siswa saat ini selalu tepat waktu, dapat diartikan bahwa orang tua memahami perannya untuk mempersiapkan anaknya tidak terlambat dari jam yang telah disepakati.

#### 4.2.4 Evaluasi Pelaksanaan PPK

Evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan melalui penilaian, yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap sikap siswa. Penerapan evaluasi di SMPN 21 Kota Malang dilakukan dengan cara sekolah memberikan buku tata tertib (tatib) dan mendapatkan point 100. Siswa memiliki kesadaran untuk menjaga point yang ada di buku tatib, karena mempengaruhi penilaian sikap di raport yang mempengaruhi kenaikan kelas. Informasi ini didapat berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan sebagai berikut:

Masing-masing anak mendapat buku tatib yang berisi point sebesar 100 pada saat mereka mulai masuk sekolah di kelas 7. Point itu bisa berkurang apabila siswa melakukan pelanggaran, seperti terlambat masuk sekolah, meninggalkan sekolah tanpa izin, dan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah lainnya (W/PPPK/A3/22-1-2019).

Berdasarkan dokumen tatib, tertera dengan rinci bentuk dan sanksi pelanggaran yang telah dirancang sedemikian rupa meliputi 12 jenis pelanggaran, antara lain: 1) keterlambatan; 2) kehadiran; 3) pakaian; 4) kepribadian; 5) ketertiban; 6) merokok; 7) pornografi; 8) senjata tajam; 9) narkoba dan minuman keras; 10) berkelahi/tawuran; 11) intimidasi/ ancaman dengan kekerasan; 12) ibadah. Masing-masing jenis pelanggaran diturunkan menjadi perilaku yang lebih spesifik, dan memiliki bobot nilai pengurang yang berbeda-beda. Misalkan saja pada pelanggaran kedua, yakni kehadiran. Terdapat 5 perilaku pelanggaran antara lain: tidak masuk tanpa keterangan yang memiliki bobot 3, tidak masuk dengan membuat keterangan palsu dengan bobot 10, keluar pada jam pelajaran tanpa izin dikurangi 5 point, tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pilihan tanpa keterangan akan dikurangi 2 point, dan tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib tanpa keterangan akan dikurangi 5 point (D/DS/A3/25-1-2019).

Sekolah telah membentuk petugas tatib *mbak*, anggota petugas tatib saat ini adalah guru PPKn dan Guru BK. Tim inilah yang bertugas untuk melakukan pendampingan bila siswa melakukan pelanggaran. Jadi kami mengedepankan pembinaan terlebih dahulu, bila memang belum menampakkan hasil baru melibatkan wali murid (W/PPPK/A3/22-1-2019).

Setiap kali siswa melakukan pelanggaran, maka petugas tatib akan memanggil secara personal dan melakukan pendalaman tentang permasalahan yang sebenarnya



terjadi. Bila memang terbukti melakukan pelanggaran maka akan dicatat di buku tatib dimana siswa dan petugas tatib akan menandatangani catatan pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian, bila point siswa di buku tatib antara 51-75, maka kewajiban bagi petugas tatib untuk melakukan pendampingan. Wali murid akan dipanggil dalam kondisi siswa tidak menunjukkan perubahan yang berarti selama masa pendampingan:

Evaluasi tidak hanya ditegaskan bila siswa melakukan pelanggaran. Apabila siswa melakukan perbuatan positif atau prestasi lainnya, maka sekolah juga memberikan penghargaan, seperti hasil wawancara berikut:

Kalau reward atau apresiasi ada, misalnya ucapan terimakasih itu juga sudah bentuk apresiasi *yaa*. Selain itu siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah akan dipanggil untuk maju ke depan lapangan sekolah saat upacara di hari senin. Itu *kan* bagus *ya*, untuk memberi apresiasi dan motivasi bagi siswa lain untuk melakukan hal positif lainnya (W/PPPK/A3/22-1-2019).

Di SMPN 21 Kota Malang terdapat suatu program yang menarik, yaitu adanya predikat kelas terbersih setiap minggunya. Kegiatan ini melibatkan peran aktif kepala sekolah, dimana setiap hari kepala sekolah akan berkeliling di semua kelas dan mengecek kebersihan kelas. Kepala sekolah akan mengumumkan kelas terbersih pada setiap hari Senin setelah upacara bendera dilaksanakan. Hal itu mungkin sederhana, tapi menimbulkan rasa bangga, sehingga mendorong siswa untuk selalu menjaga kebersihan kelasnya.

Selain itu, terdapat pula dana bimbingan bagi siswa yang berprestasi memenangkan berbagai lomba baik pada skala regional maupun nasional. Siswa yang berprestasi juga akan dipanggil namanya untuk maju pada saat selesai melaksanakan upacara bendera di hari Senin, dengan menyebutkan prestasi yang telah diraih, ditambah dengan pemberian sejumlah dana pembinaan sebagai bentuk penghargaan, yang berasal dari dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Untuk memastikan dan mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi PPK berbasis sekolah, pihak sekolah juga melakukan program asesmen, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPK secara internal.

Program evaluasi internal dilakukan bulan Juli 2019 kemarin *mbak*. Seharusnya pada tahun 2019 evaluasi dilakukan oleh pihak eksternal, tapi sampai saat ini masih belum ada penjadwalan (W/PPPK/A3/22-1-2019).



Program asesmen, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPK ini dilakukan sebagai bahan untuk peningkatan mutu pelaksanaan gerakan PPK di sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan observasi, meliputi observasi lingkungan fisik sekolah, lingkungan sosial sekolah, dan budaya karakter sekolah, dengan menggunakan angket berupa instrumen yang didasarkan pada pedoman penilaian PPK. Pada periode tahun 2019, program dilaksanakan pada bulan Juli, dan pada bulan Agustus telah terdokumentasi hasil dari asesmen, monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Dari dokumen yang didapat, menyatakan bahwa kualitas keberhasilan pelaksanaan PPK SMPN 21 Malang memiliki nilai B (3,00-3,5) dengan arti bahwa SMPN 21 Malang telah melaksanakan PPK dan sudah menjadi kebiasaan (D/PPPK/A3/22-10-2019).

Berdasarkan kondisi riil yang terjadi apabila dilihat dari hasil observasi dan kemudian dikaitkan dengan wawancara dan dokumen yang disampaikan oleh informan, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan program pendidikan karakter terbukti mampu untuk memberikan perubahan karakter positif terhadap peserta didik, sehingga program ini penting untuk terus dijalankan.

## **5. Pembahasan**

### **5.1 Implementasi PPK Berbasis Budaya Sekolah**

SMPN 21 Kota Malang dalam mempersiapkan implementasi program PPK berbasis budaya sekolah mengacu pada modul konsep dan pedoman PPK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa persiapan yang matang merupakan salah satu prasarat agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agung, 2017), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi PPK haruslah didukung dengan konsep yang jelas, rinci, dan terarah baik, dan memiliki penjabarannya yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan dapat digunakan sebagai acuan operasionalisasinya. Hal yang sama juga diungkap oleh penelitian yang dilakukan oleh Dalmeri (2014), yang menyatakan bahwa pelaksanaan PPK sudah sepatutnya dilakukan melalui perencanaan yang baik, sistematis dan berkelanjutan pada setiap aspek kehidupan terutama pada institusi pendidikan.

Pelaksanaan PPK di SMPN 21 Kota Malang telah dilaksanakan dengan baik, melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan, dan pengkondisian. Secara umum, kegiatan implementasi PPK yang dilakukan oleh SMPN 21 Kota Malang memiliki pola kegiatan yang hampir sama dengan kegiatan yang dilakukan di sekolah lain. Penelitian ini semakin memperkuat pendapat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani (2014), Satyawati (2015), Anggraini dan Zulfiati (2017), serta Andriarini, Arifin, dan Nurabadi (2018), bahwa pada dasarnya pelaksanaan PPK di lapangan telah berjalan dengan baik.

Kegiatan implementasi yang telah diterapkan di SMPN 21 Kota Malang pada dasarnya telah sejalan dengan teori perubahan perilaku yang diusung oleh Thorndike dan Pavlov, serta teori *Social Learning* yang dirintis oleh Albert Bandura. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2015) dan Familus (2016) tentang teori belajar aliran behavioristik menunjukkan bahwa bentuk perubahan tingkah laku siswa dengan cara yang baru dapat terjadi berdasarkan hasil interaksi antara stimulus dan respon. Tentunya stimulus dan respon bisa berhasil melalui proses latihan, pengulangan, dan pembiasaan secara terus menerus atau yang lebih dikenal dengan istilah habituasi. Hal inilah yang menjadi dasar bagi pengembang PPK di sekolah untuk merancang kegiatan yang memberikan stimulus positif agar menghasilkan respon yang positif, terutama bagi perubahan perilaku siswa melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di ruang lingkup sekolah.

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Berge (2009), serta Rahmawati (2014) menyatakan bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, kan tetapi juga melalui peniruan. Senada dengan hal tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Marzuki (2016) menunjukkan bahwa keteladanan yang ditunjukkan oleh pendidik melalui sikap, penampilan, tutur kata dan ciri kepribadian yang baik dalam keseharian di sekolah sangat penting bagi proses internalisasi nilai-nilai positif kepada siswa.

## **5.2 Peran Sekolah Dalam Mendukung Implementasi PPK**

Peran sekolah sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program PPK yang telah dirancang. Salah satu peran yang dilakukan oleh SMPN 21 Kota Malang dalam mendukung pelaksanaan PPK adalah melalui penyediaan sarana

dan prasarana yang memadai. Zurqoni, Retnawati, Arlinwibowo, dan Apino (2018) dalam penelitian mereka menyatakan bahwa dalam strategi dan implementasi pendidikan karakter, selain mempersiapkan program yang sesuai juga harus menyiapkan fasilitas yang mendukung. Penemuan ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Furi (2013), Judiani (2010), dan Satyawati (2015). Pentingnya fasilitas sekolah semakin diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee (2009), yang menyatakan bahwa kurang mendukungnya sarana maupun prasarana sekolah mengarah pada sulitnya mempertahankan proses PPK.

Selanjutnya, sekolah tidak hanya terfokus pada intrakurikuler dan kokurikuler saja tetapi juga ekstrakurikuler secara seimbang. Terutama untuk kegiatan ekstrakurikuler, sekolah menawarkan berbagai kegiatan sehingga siswa dapat memilih sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya. Hal ini juga didukung dengan berbagai program unggulan sekolah yang mampu meningkatkan peran siswa serta mengasah inovasi dalam memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia, sehingga mendapat apresiasi berupa berbagai penghargaan.

Towaf (2014) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berbagai kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat sisi akademik tetapi juga memperkuat karakter siswa. Hal yang senada juga diungkap pada penelitian yang dilakukan oleh Satyawati (2015). Penelitian ini menyatakan bahwa kegiatan pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dikemas sedemikian rupa, dapat memberikan motivasi siswa untuk membangun karakter diri dengan tumbuhnya perubahan tingkah laku ke arah yang positif, sehingga pelaksanaan pendidikan karakter berjalan dengan efektif.

Wali murid memegang peranan penting untuk mengajarkan nilai-nilai karakter di rumah. Lickona (2012) menegaskan bahwa proses pendidikan karakter dan moral yang efektif, di samping dilaksanakan oleh sekolah juga diperlukan dukungan dari pihak keluarga. Lebih lanjut menurut Lickona, meskipun sekolah mampu meningkatkan pemahaman awal para siswanya, sikap baik yang dimiliki oleh anak-anak tersebut akan perlahan menghilang jika nilai-nilai yang telah diajarkan di sekolah tersebut tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan rumah.

Senada dengan pendapat Lickona, See dan Arthur (2011) serta Novita, Amirullah, dan Ruslan (2016) menegaskan bahwa orangtua tidak bisa sepenuhnya

menggantungkan pendidikan karakter anak kepada pihak sekolah, karena orang tua merupakan guru utama yang berperan membina dan meningkatkan perkembangan anak sejak dini. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Triatmanto (2010) yang menyimpulkan bahwa pendidikan karakter di sekolah tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan lingkungan baik dari keluarga maupun masyarakat.

## **6. Simpulan Dan Saran**

### **6.1 Simpulan**

Secara umum, implementasi PPK berbasis budaya sekolah di SMPN 21 Kota Malang telah dilaksanakan dengan baik, melalui perencanaan berdasarkan modul konsep dan pedoman PPK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui tahapan-tahapan yang telah dijabarkan dalam modul, dimulai dengan: menentukan nilai-nilai PPK, menyusun jadwal PPK, mendesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), melakukan evaluasi peraturan sekolah, serta proses sosialisasi. Kegiatan pembiasaan dilakukan secara sinergis, melalui kegiatan rutin, spontan, keteladanan dan pengkondisian. Implementasi PPK juga telah melibatkan seluruh potensi yang ada di sekolah secara terencana, sistematis, dan terpadu dengan melibatkan seluruh elemen pendidikan.

Peran sekolah dalam mendukung implementasi PPK berbasis budaya sekolah telah dilaksanakan dengan baik, melalui sarana dan prasarana yang mendukung program, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang bermuatan PPK, mengembangkan berbagai program unggulan, evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program, serta menjaga keharmonisan dengan wali murid dalam penanaman karakter terhadap siswa.

SMPN 21 Kota Malang memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan nilai-nilai karakter yang ada. Keberhasilan program PPK terlihat melalui observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dimana program kerja yang telah disusun oleh tim pengembang PPK telah berlangsung sesuai dengan harapan. Mengingat keberhasilan program, sudah sepatutnya sekolah mulai merancang alternatif nilai pendukung lain yang selaras dengan visi sekolah dan mengembangkan karakter siswa menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas dan berkarakter, akan tetapi juga memiliki modal sosial agar dapat bersaing di lingkungan yang semakin global.

## 6.2 Saran

Berdasarkan simpulan dalam kajian ini dapat disarankan sebagai berikut: Pertama, walaupun secara umum implementasi PPK berbasis budaya sekolah di SMPN 21 Kota Malang telah dilaksanakan dengan baik, sekolah perlu lebih meningkatkan perhatian pada kondisi personal siswa, mengingat untuk saat ini input peserta didik tidak sama dengan kondisi sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya program zonasi, yang menyebabkan input peserta didik yang lebih heterogen.

Peran sekolah secara internal dalam implementasi program PPK sudah dilaksanakan dengan baik. Salah satu masukan yang bisa menjadi perhatian bagi pihak sekolah adalah untuk lebih memacu dan mendukung kreatifitas siswa untuk terus berinovasi dalam berbagai program unggulan, sehingga mampu terus bersaing dalam *Greenhouse Festival* atau perlombaan lainnya. Walaupun hubungan dengan pihak eksternal juga telah dilakukan dengan baik, akan tetapi perlu ditingkatkan terlebih dalam hal menjalin komunikasi dengan wali murid serta melibatkan warga sekitar sekolah untuk mendukung implementasi PPK. Keberhasilan implementasi PPK berbasis budaya sekolah sangat dipengaruhi oleh peran keluarga karena siswa di berada di lingkungan sekolah hanya sekitar 9 jam, dan sebagian besar waktunya, yaitu sekitar 15 jam ada di lingkungan keluarga. Kepada peneliti lain yang memiliki perhatian terhadap penerapan implementasi PPK sebaiknya meneliti pengaruh keberhasilan dari faktor keluarga dan masyarakat.

Meningkatkan potensi sekolah yang sangat besar, sudah sepatutnya SMPN 21 Kota Malang mulai mengembangkan nilai karakter positif yang disesuaikan dengan visi dan kultur sekolah. Selain nilai utama serta sub nilai yang sudah dirancang oleh pemerintah, tidak ada salahnya untuk mengadaptasi nilai-nilai positif yang diterapkan di negara lain. Salah satu nilai yang saat ini menjadi perhatian dan menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam adalah meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar melalui kegiatan *Service Learning*. Kegiatan ini dirasa penting untuk mulai diimplementasikan karena mampu memberikan pengalaman nyata bagi siswa. Dengan kegiatan ini siswa dapat mengembangkan kecakapan hidup dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

Desain *Service Learning* sebaiknya dirancang dengan lebih nyata dan sederhana, sehingga dapat diterapkan dengan mudah dalam bagi siswa sekolah menengah pertama. Penyederhanaan dilakukan dalam lingkup pelayanan, dimana masyarakat yang dijadikan target untuk melakukan kegiatan disederhanakan menjadi ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu: keluarga, tetangga dekat, teman-teman peserta didik yang tidak satu kelas, atau teman-teman dalam satu perkumpulan tertentu. Perlu ditekankan disini bahwa kegiatan yang dirancang merupakan suatu hal yang dapat dengan mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan siswa, misalnya saja membantu orang lain secara fisik, menghibur orang lain, atau menyumbangkan keahlian yang dimiliki. Contoh sederhana kegiatan ini adalah bila siswa memiliki trik untuk menyelesaikan perhitungan bilangan matematika secara lebih sederhana, mereka dapat menjadikan hal tersebut sebagai bahan untuk kegiatan *Service Learning* yang dilakukan kepada adik kelas.

Kegiatan *Service Learning* ini bila dikaitkan dengan nilai yang diimplementasikan di Amerika mengarah pada nilai *Democratic Citizenship*. Kegiatan ini juga dapat mengarahkan siswa membentuk modal sosial agar memiliki kepedulian sosial, rasa empati, pentingnya berbagi, tenggang rasa, tolong menolong, gotong royong, rasa percaya diri, dan lebih mengembangkan aspek afektifnya. Kegiatan ini sejalan pula dengan nilai karakter yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Pembudayaan nilai ini dapat diterapkan di SMPN 21 Kota Malang sebagai budaya baru yang dapat menarik minat siswa dan semakin meningkatkan implementasi PPK di sekolah sehingga visi sekolah untuk menciptakan mutu lulusan yang berprestasi dan berakhlak mulia dapat tercipta.



## RUJUKAN

- Agboola, A., & Tsai, K. C. (2012). Bring Character Education into Classroom. *European Journal of Educational Research*, 1(2), 162–170. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Agung, I. (2017). Peran Fasilitator Guru dalam Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). *Perspektif Ilmu Pendidikan*, 31(2), 106–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/PIP.312.6>
- Andriarini, S. E., Arifin, I., & Nurabadi, A. (2018). Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan dalam Peningkatan Mutu Sekolah. *JAMP: Jurnal Adminitrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(2), 238–244.
- Anggraini, M. S. A., & Zulfiati, H. M. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di SD N Kotagede 3 Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3(3), 151–158.
- Anshori, I. (2017). Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1243>
- Arthur, J. (2016). Convergence on Policy Goals: Character Education in East Asia and England. *Journal of International and Comparative Education*, 5(2), 59–72. <https://doi.org/10.14425/jice.2016.5.2.59>
- Balakrishnaan, V. (2010). The Development of Moral Education in Malaysia. *Asia Pasific Journal of Educators and Education*, 25, 89–101. Retrieved from <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-0033885929&partnerID=40&md5=0fafa4df1e1f6fb3651b1149766bdb37>
- Dalmeri. (2014). Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter (Telaah terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam Educating for Character). *Al-Ulum*, 14(1), 269–288.
- Daryanto. (2015). *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Familus. (2016). Teori Belajar Aliran Behavioristik Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran. *Jurnal PPKn & Hukum*, 11(2), 98–115.
- Fitria, N. (2017). *Konsep Pendidikan Karakter Menurut Thomas Lickona dan Yusuf Qardhawi*. Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Furi, E. R. (2013). *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Ummat Trenggalek*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hartati, A. Y. (2018). Asian Values di Singapura (Studi Tentang Peran Konfusianisme dalam Kemajuan Politik Singapura). *Sosio Dialektika-Jurnal Ilmu Sosial-Humaniora*, 3(1), 1–21.
- Harun, C. Z. (2015). Manajemen Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Karakter*, III(3), 302–308. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hendarman, Saryono, D., Supriyono, Kamdi, W., Sunaryo, Latipun, ... Haura, T. (2017). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. (L. Muliastuti, Ed.) (2nd ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Irianto, S. (2012). *Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irwan. (2015). Teori Belajar Aliran Behavioristik Serta Implikasinya Dalam Pembelajaran Improvisasi Jazz. *Jurnal PPKn & Hukum*, 10(2), 95–117.
- Istiningsih. (2016). Character Education of the Most Developed Countries in ASEAN. *Journal of Education and E-Learning Research*, 3(1), 32–37. <https://doi.org/10.20448/journal.509/2016.3.1/509.1.32.37>
- Jalaludin. (2012). Membangun SDM Bangsa Melalui Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(2), 1–14.
- Judiani, S. (2010). Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(April), 280–289.
- Lee, C.-M. (Angela). (2009). The planning, implementation and evaluation of a character-based school culture project in Taiwan. *Journal of Moral Education*, 38(2), 165–184. <https://doi.org/10.1080/03057240902792686>
- Lickona, T. (2012). *Educating for Character: Mendidik untk Membentuk Karakter*. (U. Wahyudin & Suryani, Eds.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Lickona, T. (2013). *Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*. Bandung: Nusa Media.
- Meirawan, D. (2010). Trilogi Karakter Manusia dan Implikasinya Pada Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17(3), 189–194.

- Novita, D., Amirullah, & Ruslan. (2016). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini Di Desa Air Pinang Kecamatan Simeuleu Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1(1), 22–30.
- Prasetyo, D., & Marzuki. (2016). Pembinaan Karakter Melalui Keteladanan Guru Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Islam Al Azhar Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Karakter*, VI(Oktober), 215–231. <https://doi.org/10.21831/jpk.v6i2.12052>
- Raharjo, S. B. (2010). Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3), 229–238. <https://doi.org/10.24832/JPNK.V16I3.456>
- Rahmawati, I. (2014). *Pengaruh Tayangan Korean Wave di Internet Terhadap Perilaku Komunitas Korean Beloved Addict (KBA)*. UIN Syarif Hidayatullah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal*. Jakarta
- Rozaq, A. K. (2018). *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam Kurikulum 2013 Revisi 2017 Melalui Pembiasaan Shalat Duha Berjamaah di SMP Negeri 26 Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Safitri, N. M. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kultur Sekolah di SMP N 14 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(2), 173–183.
- Satyawati, S. T. (2015). *Model Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah di SMP Mardi Rahayu Ungaran*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- See, B. H., & Arthur, J. (2011). The Potential Role of Schools and Teachers in The Character Development of Young People in England: Perspectives from Pupils and Teachers. *Evaluation & Research in Education*, 24(2), 143–157. <https://doi.org/10.1080/09500790.2011.560664>
- Smith, M., & Berge, Z. L. (2009). Social Learning Theory in Second Life. *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching*, 5(2), 439–445.
- Sudarsono, A., Sudrajat, & Wibowo, S. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter di

- SMP Negeri 2 Klaten dan MTs. Wahid Hasyim Yogyakarta. *JIPSINDO*, 3(1), 66–82.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sultoni, A. (2016). Pendidikan Karakter dan Kemajuan Negara: Studi Perbandingan Lintas Negara. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1), 184–207.
- Suyanto, S. (2011). Hasil Implementasi Pendidikan Karakter Di Amerika Serikat: Meta-Analisis Studi. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta*, 224–235.
- Taufik. (2014). Pendidikan Karakter di Sekolah: Pemahaman, Metode Penerapan, dan Peranan Tiga Elemen. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(1), 59–65. <https://doi.org/10.1021/nl0714334>
- Towaf, S. M. (2014). Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(1), 75–85. <https://doi.org/10.17977/JIP.V2011.4380>
- Triatmanto. (2010). Tantangan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah. *Cakrawala Pendidikan*, XXIX, 187–203.
- Tyas, M. K. (2018). *Analisis Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pembiasaan Sekolah di SDN Tlogomas 2 Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wahyu. (2011). Masalah dan Usaha Membangun Karakter Bangsa. *Komunitas*, 3(2), 138–149. <https://doi.org/10.1902/annals.2000.5.1.68>
- Wardani, K. (2014). *Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di SD Negeri Taji Prambanan Klaten. Proceeding Seminar Nasional Konservasi dan Kualitas Pendidikan*.
- Zurqoni, Retnawati, H., Arlinwibowo, J., & Apino, E. (2018). Strategy and Implementation of Character Education in Senior High Schools and Vocational High Schools. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(3), 370–397.

## KODE CATATAN LAPANGAN

### A. Kode Teknik Pengumpulan Data

Kode Wawancara : W

Kode Observasi : O

Kode Dokumentasi : D

### B. Kode informan

PPPK : Pengembang Penguatan Pendidikan Karakter

PDTP : Pendidik dan Tenaga Kependidikan

S : Siswa

### C. Kode Topik

A1 : Tahapan persiapan implementasi PPK

A2 : Model yang digunakan dalam praktik penyelenggaraan PPK berbasis budaya di lingkungan sekolah

A3 : Peran budaya sekolah dalam mendukung implementasi PPK.

### D. Cara Membaca Kode

(W/PPPK/A1/22-1-2019) W : Teknik yang digunakan wawancara

PPPK : Informasi diperoleh dari Pengembang Penguatan Pendidikan Karakter

A1 : Topik tentang Tahapan persiapan implementasi PPK

22-1-2019 : Tanggal 22 bulan Januari tahun 2019